

**STRATEGI PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU
DI KELURAHAN BUNTUSU, KECAMATAN
TAMALANREA, KOTA MAKASSAR.**

SKRIPSI

Oleh:

SEKAR AYU DELIMA S

NIM. 45 16 042 032



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

**STRATEGI PEMENUHAN RUANG TERBUKA
HIJAU (RTH) DI KELURAHAN BUNTUSU,
KECAMATAN TAMALANREA, KOTA
MAKASSAR.**

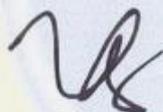
Disusun dan diajukan oleh

SEKAR AYU DELIMA S

NIM. 45 16 042 032

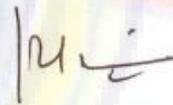
Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Ir. H. Muh. Fuad Azis DM, ST, M.Si
NIDN: 9909005178

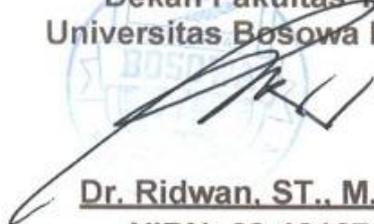
Pembimbing II



Ir. Hj. Rahmawati Rachman, M.Si
NIDN: 09-070468-01

mengetahui :

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bosowa Makassar



Dr. Ridwan, ST., M.Si
NIDN: 09-101271-01

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota



Dr. Ir. Rudi Latief, M.Si
NIDN: 09-170768-01

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, Nomor : A.025/SK/FT/UNIBOS/II/2021 Pada Tanggal 13 Januari 2021 Tentang panitia dan penguji tugas akhir mahasiswa jurusan perencanaan wilayah dan kota, Maka :

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 21 Januari 2021

Skripsi Atas Nama : Sekar Ayu Delima S

NIM : 4516042032

Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara Jenjang Strata Satu (S-1), pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ir. H. Muh. Fuad Azis DM, ST, M.Si

Sekretaris : Ir. Hj. Rahmawati Rachman, ST, M.Si

Anggota : 1. Dr. Ir. Rudi Latief, M.Si

2. Jufriadi, ST, M.SP

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR


Dr. RIDWAN, ST, M.Si
NIDN : 0910127101

KETUA JURUSAN
TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA


Dr. Ir. RUDI LATIEF, M.Si
NIDN : 0917076801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sekar Ayu Delima S
NIM : 45 16 042 032
Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis/ajukan ini benar-benar hasil karya sendiri, dengan arahan komisi pembimbing dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima segala konsekuensi/sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 21 Januari 2021

Yang menyatakan,



Sekar Ayu Delima S

**STRATEGI PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU DI
KELURAHAN BUNTUSU, KECAMATAN TAMALANREA,
KOTA MAKASSAR.**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik (ST)

BOSOWA

Oleh

SEKAR AYU DELIMA S

NIM 45 16 042 032

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2021**

ABSTRAK

Sekar Ayu Delima S, 2021 "Strategi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar". Dibimbing Oleh Fuad Azis dan Rahmawati Rachman"

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab belum terpenuhinya ruang terbuka hijau di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Serta untuk mengidentifikasi strategi pemenuhan ruang terbuka hijau di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Variabel yang digunakan yaitu, kependudukan, ketersediaan lahan, dan peran serta masyarakat di Kelurahan Buntusu. Metode analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif, selanjutnya menyusun strategi pemenuhan ruang terbuka hijau di Kelurahan Buntusu dengan mengkaji teori menggunakan studi literatur.

Seluruh variabel memiliki pengaruh terhadap belum terpenuhinya ruang terbuka hijau di Kelurahan Buntusu. Sehingga strategi yang dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau yaitu, penataan jalur hijau, peningkatan kualitas dan kuantitas taman lingkungan dengan mengidentifikasi lahan kosong yang kiranya dapat difungsikan menjadi ruang terbuka hijau, pemanfaatan taman atap (*rooftop garden*) serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ruang terbuka hijau.

Kata Kunci : Strategi, Ruang Terbuka Hijau, Pemenuhan RTH

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Allahamduillahi Rabbil'alamin. Segala puji syukur tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha Tunggal, Pencipta Alam semesta beserta isinya dan tempat berlindung bagi umat Nya. Shalawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Atas limpah rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul "Strategi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar" penelitian ini berisikan tentang faktor penyebab belum terpenuhinya ruang terbuka hijau dan strategi pemenuhan ruang terbuka hijau di Kelurahan Buntusu.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Hj. Sitti Salma S dan Ayahanda (Alm) AKP. Suwondo, SE yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya serta perhatian moril dan materilnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat,

kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas segala didikan serta budi baik dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Olehnya dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. M. Saleh Pallu, M.Eng** selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak **Dr. Ridwan, ST., M.Si** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak **Ir. Rudi Latief, M.Si** selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak **Dr. Ir. H. Muh. Fuad Azis DM. ST, M.Si** selaku Pembimbing pertama yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Ir. H. Rahmawati Rachman, M.Si** selaku Pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Jufriadi, ST, M.SP** selaku Penasihat Akademik yang sedia memberikan arahan akademik kepada penulis
7. **Kelurahan Buntusu** yang bersedia memberikan data dan pengetahuan tentang lokasi penelitian.

8. **Putri Rahayu Kusumaningrum S, S.Kom. Muh. Alif Cannons Apt. Dewi Andini Atmasari S, S.Farm. Widya Utami Ayu Ningsih S. Tr.Keb, Bachrul Ulum dj, ST. Dyah Ayu Pratiwi S,.**

Kakak-kakak yang tercinta terimakasih atas do'a, dukungan, motivasi yang membuat saya selalu semangat sampai saat ini.

9. Kepada keluarga besar **Bengkel Seni Teknik, KBM-FT, dan HMPWK Universitas Bosowa** yang senantiasa memberikan dukungan serta pengalaman berharga kepada penulis. Panjang umur orang-orang baik.

10. Kepada Saudara/I **Umy Amaliah, Krisna Yudha Suatrat, Dian Prasetya** yang telah bersedia menemani penulis dalam kesehariannya dan memberikan dukungan baik secara fisik atau pun nonfisik. Serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih banyak, semoga kebahagiaan selalu menghampiri.

11. Kepada teman-teman seperjuangan skripsi **Liza, Mutya, Rivqa, Ebi, Regil, Bernadeth, Alfian, Arsof, Kak Valen, Farah, Ayu, Ainsyah, Satriadi** yang telah bersedia diskusi dan membantu dalam menyelesaikan penelitian ini dengan selalu memberikan semangat, terima kasih banyak, kalian luar biasa.

12. Kepada sahabat **Teras Putih, Fast five, Grubel** yang selalu ada menemani dan membantu penulis serta memberikan kebahagiaan dalam hidup penulis.

13. Kepada seluruh sahabat dan saudara-saudaraku seperjuangan **PWK 2016 (SPACE16)**, yang selalu memberikan kritik dan dukungan serta memberikan cerita baru dalam kehidupan penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi sistematika penulisan dan isinya. Oleh karena itu, dengan indra dan hati yang terbuka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini kedepannya. Besar harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Januari 2021



Sekar Ayu Delima S

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENERIMAAN

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Ruang Lingkup 9

F. Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ruang Terbuka 11

B. Pengertian Ruang Terbuka Hijau 12

C. Tujuan Ruang Terbuka Hijau 17

D. Fungsi Ruang Terbuka Hijau 19

1. Fungsi Ekologis 20

2. Fungsi Sosial dan Budaya 21

3. Fungsi Ekonomi 21

4. Fungsi Estetika 21

E. Jenis Ruang Terbuka Hijau 24

1. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan 24

2. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Permukiman 39

F. Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau 42

G. Pengertian Lahan dan Penggunaan Lahan 45

H. Peran Serta Masyarakat.....	47
1. Koneksi.....	49
2. <i>After Merge</i>	49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	54
B. Waktu Penelitian	54
C. Populasi dan Sampel	54
1. Populasi.....	54
2. Sampel	55
D. Jenis dan Sumber Data.....	55
1. Jenis Data.....	55
a. Data Kualitatif	55
b. Data Kuantitatif.....	56
2. Sumber Data.....	56
a. Data Primer	56
b. Data Sekunder	56
E. Teknik Pengumpulan Data	57
1. Observasi	57
2. Wawancara dan <i>Interview</i>	57
3. Dokumentasi.....	58
F. Variabel Penelitian	58
G. Metode Analisis Data	58
1. Analisis Deskriptif	59
2. Studi Literatur	59
H. Definisi Operasional.....	59
I. Kerangka Pikir.....	62

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Makassar	63
1. Aspek Fisik Dasar	63
a. Letak Geografis dan Administrasi	63
b. Kondisi Topografi.....	67
c. Kondisi Geologi	68

d. Kondisi Hidrologi.....	68
e. Kondisi Klimatologi	70
f. Kondisi Eksisting Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar	74
2. Aspek Kependudukan.....	75
a. Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk.....	76
b. Distirbusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	76
c. Laju Pertumbuhan Penduduk	79
B. Gambaran Umum Kecamatan Tamalanrea.....	80
1. Aspek Fisik Dasar	80
a. Letak Geografis dan Administrasi.....	80
b. Kondisi Topografi.....	83
c. Kondisi Geologi	83
d. Kondisi Hidrologi.....	83
e. Kondisi Klimatologi	84
f. Kondisi Eksisting Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Tamalanrea	85
2. Aspek Kependudukan.....	86
a. Jumlah Penduduk.....	86
b. Kepadatan Penduduk	87
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	88
1. Aspek Fisik Dasar	88
a. Letak Geografisdan Administrasi	88
2. Aspek Kependudukan.....	90
a. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	90
3. Aspek Sarana	90
a. Sarana Pendidikan	90
b. Sarana Kesehatan.....	92
c. Sarana Peribadatan.....	93
d. Sarana Olahraga	94
4. Aspek Prasarana	96
a. Kondisi Prasarana	96
b. Kondisi Prasarana Drainase	97

c. Kondisi Prasarana Air Bersih.....	98
5. Kondisi Eksisting Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Buntusu	99
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	103
1. Analisis Deskriptif	105
a. Pertumbuhan Penduduk.....	106
b. Ketersediaan Lahan Kosong	106
c. Kurangnya Sosialisasi Pemerintah	107
d. Kurangnya Partisipasi Masyarakat	107
2. Strategi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Buntusu	107
a. Penataan Jalur Hijau (<i>Green belt</i>)	108
b. Pemanfaatan Taman Atap (<i>Roof top Garden</i>)	109
c. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Taman Lingkungan	110
d. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat.....	111
e. Menerapkan <i>social learning</i> Kepada Masyarakat	112
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH)	26
Tabel 4.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Makassar Tahun 2019	64
Tabel 4.2	Pengamatan Suhu ($^{\circ}\text{C}$) Menurut Bulan Di Kota Makassar Tahun 2019	71
Tabel 4.3	Pengamatan Tingkat Kelembaban (%) Menurut Bulan Di Kota Makassar Tahun 2019	72
Tabel 4.4	Jumlah Curah Hujan (mm) Dan Penyinaran Matahari (%) Kota Makassar Tahun 2019	73
Tabel 4.5	Hasil Rekap Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar Tahun 2019	74
Tabel 4.6	Distribusi dan Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Makassar Tahun 2019	77
Tabel 4.7	Distribusi Penduduk menurut Rasio Jenis Kelamin Di Kota Makassar menurut Kecamatan Tahun 2017	78
Tabel 4.8	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Makassar Tahun 2017	79
Tabel 4.9	Luas Wilayah Menurut Kelurahan Kecamatan Tamalanrea Tahun 2018	80
Tabel 4.10	Luas RTH di Kecamatan Tamalanrea Tahun 2019	85
Tabel 4.11	Distribusi Penduduk menurut Rasio Jenis Kelamin Di Kecamatan Tamalanrea menurut Kelurahan 2018	86

Tabel 4.12	Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Tamalanrea Tahun 2018	87
Tabel 4.13	Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan Buntusu Tahun 2020	90
Tabel 4.14	Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kelurahan Buntusu Tahun 2020	91
Tabel 4.15	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Buntusu Tahun 2020	92
Tabel 4.16	Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kelurahan Buntusu Tahun 2020	93
Tabel 4.17	Jumlah Fasilitas Olahraga di Kelurahan Buntusu Tahun 2020	95
Tabel 4.18	Luas Penggunaan Lahan dan Presentase Kelurahan Buntusu	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pikir	62
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Makassar	66
Gambar 4.2 Peta Administrasi Kecamatan Tamalanrea	82
Gambar 4.3 Peta Administrasi Kelurahan Buntusu	89
Gambar 4.4 Sarana Pendidikan di Kelurahan Buntusu	91
Gambar 4.5 Sarana Kesehatan di Kelurahan Buntusu.....	93
Gambar 4.6 Sarana Peribadatan di Kelurahan Buntusu	94
Gambar 4.7 Sarana Olahraga di Kelurahan Buntusu	95
Gambar 4.8 Prasarana Jalan di Kelurahan Buntusu	97
Gambar 4.9 Prasarana Drainase di Kelurahan Buntusu	98
Gambar 4.10 Kondisi Taman di Kelurahan Buntusu	99
Gambar 4.11 Kondisi Lapangan di Kelurahan Buntusu.....	100
Gambae 4.12 Kondisi Mangrove/Bakau di Kelurahan Buntusu	100
Gambar 4.13 Kondisi Jalur Hijau di Kelurahan Buntusu.....	101
Gambar 4.14 Peta Persebaran Eksisting RTH di Kelurahan Buntusu .	102
Gambar 4.115 Peta Penggunaan Lahan Kelurahan Buntusu.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota merupakan perwujudan aktivitas manusia yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, dan pendidikan, serta penyedia fasilitas pelayanan bagi masyarakat. Dalam perjalanannya, kota mengalami perkembangan yang sangat pesat akibat adanya dinamika penduduk, perubahan sosial ekonomi, dan terjadinya interaksi dengan wilayah lain. Perkembangan kota melahirkan sebuah konsep kota yang berwawasan lingkungan atau berkelanjutan, yang kemudian melahirkan istilah kota ekologis dimana kota berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia secara organik dengan membangun lingkungan yang mendukung antara lain dengan adanya ruang terbuka hijau (RTH) yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah kota modern.

Ruang terbuka hijau kota merupakan pertemuan antara sistem alam dan manusia dalam lingkungan perkotaan (urban). Kawasan perkotaan yang berkelanjutan ditandai oleh interaksi dan hubungan timbal balik yang seimbang antara manusia dan alam yang hidup berdampingan di dalamnya. Pada kasus lingkungan perkotaan berkepadatan tinggi, keseimbangan tersebut mengalami

gangguan akibat berkurangnya ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, mengembalikannya ke dalam lingkungan perkotaan dengan berbentuk sistem dinilai penting. Pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau kota, terutama dalam lingkungan tempat tinggal, telah dibuktikan dalam beberapa penelitian (Wu, 2008). Ruang terbuka hijau kota merupakan komponen penting yang mempengaruhi kualitas kehidupan manusia, baik secara ekologis maupun sosial-psikologis. Namun demikian, saat ini proporsinya semakin berkurang sebagai dampak dari tingginya kepadatan penduduk akibat pertumbuhan populasi manusia yang semakin meningkat.

Pertambahan jumlah penduduk tersebut mengakibatkan terjadinya densifikasi penduduk dan permukiman yang cepat dan tidak terkendali di bagian kota. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan ruang meningkat untuk mengakomodasi kepentingannya. Semakin meningkatnya permintaan akan ruang khususnya untuk permukiman dan lahan terbangun berdampak kepada semakin merosotnya kualitas lingkungan. Rencana Tata Ruang yang telah dibuat tidak mampu mencegah alih fungsi lahan di perkotaan sehingga keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin terancam dan kota semakin tidak nyaman untuk beraktivitas. (Roswidyatmoko Dwihartmojo, 2013).

Peningkatan populasi tersebut secara tidak langsung diikuti oleh peningkatan kebutuhan akan konsumsi energi dan lahan bermukim. Hal ini tidak diimbangi oleh pengendalian guna lahan yang berfungsi membatasi intervensi manusia terhadap lingkungan alam perkotaan. Pembangunan kawasan perkotaan secara fisik cenderung menghabiskan ruang-ruang terbuka dan menjadikannya area terbangun. Kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak keberbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, pencemaran udara, serta menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang untuk berinteraksi sosial.

Pesatnya kegiatan pembangunan dan tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan sebagai pusat dari kegiatan sosial ekonomi tidak hanya berdampak kepada sulitnya masyarakat perkotaan untuk mendapat lingkungan hidup yang bersih dan nyaman namun juga berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan ruang kota dan tekanan pemanfaatan ruang kota, yang akhirnya mengakibatkan banyaknya alih fungsi lahan untuk kegiatan komersil dan pemukiman sehingga kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan ruang publik sebagai tempat hiburan berupa fasilitas

umum dan sosial sulit untuk ditemukan. Padahal di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dengan jelas mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

James Siahaan (2010) menyatakan bahwa kecenderungan terjadinya penurunan kuantitas ruang publik, terutama RTH pada 30 tahun terakhir sangat signifikan. Di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung, luasan RTH telah berkurang dari 35% pada awal tahun 1970-an menjadi 10% pada saat ini. Ruang terbuka hijau yang ada sebagian besar telah dikonversi menjadi infrastruktur perkotaan dan kawasan permukiman baru. Permasalahan utama keberadaan RTH adalah semakin berkurangnya RTH karena keterbatasan lahan dan ketidakkonsisten dalam menerapkan tata ruang. Berkurangnya RTH disebabkan oleh konversi lahan yaitu beralih fungsinya RTH untuk peruntukan ruang yang lain.

Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik yang ada diperkotaan, baik berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ruang terbuka non-hijau telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir diperkotaan, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan

sosial (kriminalitas dan krisis sosial), menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial. Dalam hal ini, diperlukan pemikiran jauh ke depan, yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan tujuan berjangka pendek, dan perlu reorientasi visi pembangunan kota lebih mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Strategi pemanfaatan ruang, baik untuk kawasan budidaya maupun kawasan lindung, perlu dilakukan secara kreatif, sehingga konversi lahan dari pertanian produktif ataupun dari kawasan hijau lainnya menjadi kawasan non hijau dan non produktif, dapat dikendalikan.

Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang. Berdasarkan wilayah administrasi, penataan ruang terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Di dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan bahwa perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luasnya minimal 30% dari luas wilayah kota yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik

dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau selain dimuat dalam RTRW Kota, RDTR Kota, atau RTR Kawasan Strategis Kota, juga dimuat dalam RTR Kawasan Perkotaan yang merupakan rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten (Permen PU No.5 Tahun 2008) tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Kota Makassar merupakan salah kota terbesar keempat di Indonesia dan merupakan kota terbesar di kawasan Indonesia Timur dengan luas 175,77 km² yang meliputi 15 kecamatan. Pada tahun 2018, jumlah kelurahan di Kota Makassar tercatat memiliki 153 kelurahan, 996 RW, dan 4.978 RT. Kota Makassar terletak antara 119 24'17'38" Bujur Timur dan 5 8'6'19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah barat Selat Makassar dan sebelah selatan Kabupaten Gowa (BPS, 2019). Pada tahun 2019 presentase luas ruang terbuka hijau di Kota Makassar mencapai 9.83% yang dimana hal ini belum sesuai dengan standa yang telah ditetapkan.

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 1.508.154 jiwa yang terdiri atas 746.951. jiwa penduduk laki-laki dan 761.203 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan

proyeksi jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Kota Makassar mengalami pertumbuhan sebesar 1,29 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,43 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,36 persen. Kepadatan penduduk di Kota Makassar tahun 2018 mencapai 8.580 jiwa/km². Hal ini menjelaskan bahwa setiap tahun jumlah penduduk di Kota Makassar semakin meningkat. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di Kota Makassar secara tidak langsung berpengaruh terhadap keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar.

Keberadaan kawasan perumahan yang memberikan kontribusi besar pada pencitraan visual Kota Makassar saat ini juga mengalami degradasi dalam hal pengelolaan ruang terbuka hijau dan ruangruang publik lainnya. Tidak jarang ditemukan kawasan perumahan dengan kondisi ruang terbuka yang secara kuantitas dan kualitas tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam SNI 03-1733 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Pemanfaatan lahan di Kelurahan Buntusu saat ini terdiri dari perumahan, prasarana, dan sarana. Pemanfaatan ruang di Kelurahan Buntusu didominasi oleh peruntukan rumah tinggal yakni sebesar 54,15% dan total luas ruang terbuka hijau hanya mencapai

7,59% hal ini menunjukkan ketidaksesuaian alokasi pemanfaatan lahan yang dimana ruang terbuka hijau paling sedikit 20% untuk publik dan 10% untuk privat dari luas wilayah sebagaimana yang telah ditetapkan UU. Nomor 26 tahun 2007.

Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai kaitan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kelurahan Buntusu guna mengidentifikasi faktor penyebab belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta merumuskan strategi pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar?
2. Bagaimana strategi pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian, yakni :

1. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar
2. Untuk mengidentifikasi strategi pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian, yaitu :

1. Dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan dalam proses penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar
2. Sebagai pedoman untuk merumus strategi dalam memenuhi kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian yang menjadi objek pada penelitian ini adalah mengidentifikasi arahan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar

F. Sitematika Penulisan

Dalam penyusunan proposal ini di bagi ke dalam lima Bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Ruang Lingkup serta Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang Batasan Pengertian Judul, Tinjauan Pustaka, pengertian kemiskinan, faktor penyebab peningkatan angka kemiskinan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Definisi Operasional, Kerangka Pikir.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang Gambaran Umum, Tinjauan Lokasi Studi, tingkat pendidikan, dan pendapatan.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ruang Terbuka

Dalam UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang adalah wadah meliputi darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (Permendagri No.1, 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan perkotaan).

Ruang umum yang merupakan bagian dari lingkungan juga mempunyai pola. Ruang umum adalah tempat atau ruang yang terbentuk karena adanya kebutuhan akan perlunya tempat untuk bertemu ataupun berkomunikasi satu sama lainnya. Dengan adanya kegiatan pertemuan bersama-sama antara manusia, maka kemungkinan akan timbulnya berbagai macam-macam kegiatan pada ruang umum tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa ruang umum ini pada dasarnya merupakan suatu wadah yang dapat menampung kegiatan/aktivitas tertentu dari manusia,

baik secara individu atau secara berkelompok (Hakim dan Utomo, 2002 : 50).

Ruang terbuka merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Dengan adanya pertemuan bersama dan relasi antara orang banyak, kemungkinan akan timbul berbagai macam kegiatan di ruang umum terbuka tersebut. Sebetulnya ruang terbuka merupakan salah satu jenis saja dari ruang umum (Eko Budiharjo & Djoko Sujarto, Kota Berkelanjutan, 2005:89).

B. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau didefinisikan sebagai ruang yang penggunaan elemen dan batas-batas fungsionalnya merupakan tanaman hijau dengan meminimalisasikan lantainya dengan perkerasan. Ruang terbuka hijau terdiri dari berbagai macam jenisnya, seperti taman, kawasan konservasi, jalur sungai, jalur hijau jalan, kawasan hijau makam, kawasan hijau pemukiman, kawasan hijau perkantoran. (Nazaruddin, 1994)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga dikatakan adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008).

Ruang terbuka hijau adalah lahan yang belum dibangun atau sebagian besar belum dibangun di wilayah perkotaan yang mempunyai nilai untuk keperluan taman dan rekreasi; konservasi lahan dan sumber daya alam lainnya; atau keperluan sejarah dan keindahan (Garvin, 1997 dalam Hariyanti, 2008).

Yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain adalah kebun halaman rumah/gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan system hidrologi dan system mikrolimat, maupun system ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta di dorong untuk menanam tumbuhan diatas bangunan miliknya. Proporsi ruang terbuka hijau public seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat (UU No.26, 2007 Tentang Penataan Ruang).

Ruang terbuka hijau sebagai ruang terbuka yang pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman

seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya (Pemendagri No.1, 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah suatu lapang yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu), sebangun lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang didalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (*perennial woody plants*), dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda-benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang bersangkutan (Purnomo Hadi,1995)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai infrastruktur hijau perkotaan merupakan bagian dari ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi tumbuh,tanaman dan vegetasi guna mendukung manfaat ekologi, sosial budaya arsitektur yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan atau kesejahteraan bagi masyarakat. Secara sosial budaya keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi

sosial, sarana rekreasi, dan sebagai kota yang berbudaya. Bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sosial budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olahraga, kebun raya maupun taman makam umum. (A. Dwiyanto,2009)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan mempunyai manfaat kehidupan yang tinggi. Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural) dan nilai estetika yang dimilikinya (obyek dan lingkungan) tidak hanya dapat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan untuk kelangsungan kehidupan perkotaan tetapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas kota. Untuk mendapatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang fungsional dan estetik dalam suatu sistem perkotaan maka luas minimal, pola dan struktur, serta bentuk dan distribusinya harus menjadi pertimbangan dalam membangun dan mengembangkannya. Karakter ekologis, kondisi dan keinginan warga kota, serta arah dan tujuan pembangunan dan perkembangan kota merupakan determinan utama dalam menentukan besaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) fungsional ini.

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) penting dalam mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan. Pengendalian pembangunan wilayah perkotaan harus dilakukan secara proporsional dan berada dalam keseimbangan antara

pembangunan dan fungsi-fungsi lingkungan. Kelestarian Ruang Terbuka Hijau (RTH) suatu wilayah perkotaan harus disertai dengan ketersediaan dan seleksi tanaman yang sesuai dengan arah rencana dan rancangannya.

Ruang terbuka hijau pada umumnya dimaksudkan untuk penghijauan sebagai salah satu unsur kota yang ditentukan oleh faktor kenyamanan dan keindahan bagi suatu ruang kota. Kenyamanan dapat berupa peredam kebisingan, pelindung cahaya matahari (peneduh) dan menetralsir udara. Sedangkan keindahan berupa penataan tanaman dibantu dengan konstruksi-konstruksi yang ditujukan untuk menahan erosi, baik berupa konstruksi beton, batu alam dan lain-lain. Pengaturan ruang terbuka hijau juga menerapkan prinsi-prinsip komposisi desain yang baik, keindahan dan kenyamanan". (Hamid Shirvani, *The Urban Design Process*, 1983:16).

Secara definitif, Ruang Terbuka Hijau (Green Openspaces) adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, Ruang Terbuka Hijau (*Green Open Spaces*) di tengah-

tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota. Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 30 % dari luas wilayah. Hampir disemua kota besar di Indonesia, Ruang terbuka hijau saat ini baru mencapai 10% dari luas kota. Padahal ruang terbuka hijau diperlukan untuk kesehatan, arena bermain, olah raga dan komunikasi publik. Pembinaan ruang terbuka hijau harus mengikuti struktur nasional atau daerah dengan standar-standar yang ada. Kebijakan pertanahan di perkotaan yang sejalan dengan aspek lingkungan hidup adalah jaminan terhadap kelangsungan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ini mempunyai fungsi “hidro-orologis”, nilai estetika dan seyogyanya sekaligus sebagai wahana interaksi sosial bagi penduduk di perkotaan.

C. Tujuan Ruang Terbuka Hijau

Tujuan pengadaan ruang terbuka hijau adalah untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih (Permen PU Nomor 05, 2008)

Menurut (Permendagri No.1, 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) tujuan dari pembentukan ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut:

Tujuan Penataan RTHKP adalah:

1. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
2. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan, dan
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Menurut (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departement Pekerjaan Umum, 2008) menunjukkan bahwa tujuan pembentukan ruang terbuka hijau adalah:

1. Keindahan (tajuk, tegakan, pengarah, pengaman, pengisi, dan peng`alas), mengurangi pencemaran udara, peredam kebisingan, memperbaiki iklim mikro, penyangga system kehidupan dan kenyamanan.
2. Perlindungan, pencegah erosi dan penahan badai
3. Pendidikan, kesenangan, kesehatan, interaksi social
4. Pendukung ekositem makro, vebtilasi dan pemersatu ruang kota
5. Kenyamanan spasial, visual, audial dan termal serta nilai ekonomi

6. Pelayanan masyarakat dan penyangga lingkungan kota, wisata alam, produksi hasil hutan

7. Keseimbangan ekosistem

8. Reservasi dan perlindungan situs bersejarah

Menurut Permen PU No.5/PRT/M, 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Pemnfaatan Ruang Teruka Hijau di Kawasan Perkotaan tujuan penyelenggaraan RTH adalah:

1. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
2. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaannyang nyaman, segar, indah, dan bersih.

D. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Terkait dengan peran masyarakatnya dan pembentuk karakter kotanya, fungsi-fungsi ruang publik yaitu pertama sebagai pusat interaksi, komunikasi masyarakat baik formal seperti upacara-upacara bendera, dan peringatan lain; informal seperti pertemuan-pertemuan individu kelompok masyarakat dalam acara santai dan rekreatif atau demonstrasi dalam menyampaikan aspirasi atau protes. Kedua sebagai ruang terbuka yang menampung koridor-koridor jalan yang menuju kearah ruang publik

tersebut dan sebagai ruang pengikat dilihat dari struktur kota, sekaligus sebagai pembagi ruang fungsi bangunan disekitarnya serta ruang untuk transit bagi masyarakat yang akan pindah kearah tujuan lain. Ketiga sebagai paru-paru kota akibat perkembangan penduduk kota yang semakin padat, sehingga masyarakat banyak yang memanfaatkan sebagai tempat olahraga, bermain, dan bersantai bersama keluarga. (Carr, 1992)

Ruang terbuka tidak dapat dipisahkan dari manusia baik secara psikologis, emosional, ataupun dimensional. Manusia berada didalam ruang, bergerak, menghayati, dan berpikir, juga membuat ruang untuk menciptakan dunianya (Djoko Sujarto, 1999: 91).

Ruang terbuka sebenarnya merupakan wadah yang dapat menampung aktifitas tertentu dari masyarakat di wilayah tersebut. Karena itu, ruang terbuka memiliki kontribusi yang akan diberikan kepada manusia berupa dampak yang positif. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fungsi ekologis:

- a. Memberi jaminan pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota).
- b. Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar.

- c. Sebagai peneduh.
- d. Produsen oksigen.
- e. Penyerap air hujan.
- f. Penyedia habitat satwa.
- g. Penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta.
- h. Penahan angin.
- i. Fungsi tambahan

2. Fungsi sosial dan budaya:

- a. Menggambarkan ekspresi budaya lokal.
- b. Merupakan media komunikasi warga kota.
- c. Tempat rekreasi.
- d. Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.

3. Fungsi ekonomi

- a. Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur.
- b. Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.

4. Fungsi estetika

- a. Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan

permukiman, maupun makro, lansekap kota secara keseluruhan.

- b. Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota.
- c. Pembentuk faktor keindahan arsitektural.
- d. Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati fungsi dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai ekologis, sosial/budaya, arsitektur dan ekonomi. Secara ekologis Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi, dan menurunkan temperatur kota. Bentuk – bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain sabuk hijau kota, hutan kota, taman botani maupun sempadan sungai.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat juga berfungsi sabagai pemandangan kota, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti peningkatan kualitas pembangunan kota yang dilaksanakan birokrasi pemerintah bias berjalan langsung dengan tertatanya taman- taman kota dan jalan – jalan kota yang

rapi menunjukkan bahwa para aparaturn pemerintah mampu melaksanakan tugas manajemen pemerintah secara baik rapi sesuai harapan masyarakat.

Berdasarkan fungsinya menurut rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau yaitu :

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai tempat rekreasi dimana penduduk dapat melaksanakan kegiatan berbentuk rekreasi, berupa kegiatan rekreasi aktif seperti lapangan olahraga, dan rekreasi pasif seperti taman.
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai tempat berkarya, yaitu tempat penduduk bermata pencaharian dan sektor pemanfaatan tanah dan secara langsung seperti pertanian pangan, kebun bunga dan usaha tanaman hias.
3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) berfungsi sebagai ruang pemeliharaan, yaitu ruang yang memungkinkan pengelolaan kota melakukan pemeliharaan unsur – unsur perkotaan seperti jalur pemeliharaan sepanjang sungai dari sungai dan selokan sebagai koridor kota.
4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai ruang pengaman, yaitu untuk melindungi suatu objek vital atau untuk mengamankan manusia dari suatu unsur yang dapat membahayakan seperti jalur hijau di sepanjang jaringan listrik

tegangan tinggi, jalur sekeliling instalasi militer atau pembangkit tenaga atau wilayah penyangga.

5. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai ruang untuk menunjang pelestarian dan pengamanan lingkungan alam, yaitu sebagai.
6. Kemungkinan terjadinya erosi dan longsoran pengamanan tepi sungai, pelestarian wilayah resapan air.
7. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai cadangan pengembangan wilayah terbangun kota dimasa mendatang.

E. Jenis Ruang Terbuka Hijau

1. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Jenis ruang terbuka hijau terdiri dari jenis ruang terbuka hijau public dan ruang terbuka hijau privat (UU No.26, 2007 Tentang Penataan Ruang). Pada intinya UU penataan ruang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau (RTH) terdiri dari ruang terbuka hijau public dan ruang terbuka hijau privat, adalah sebagai berikut:

- a. RTH Publik RTH public merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau public antara lain adalah:

- Taman kota

- Taman pemakaman umum
- Jalur hijau sepanjang sungai, jalan, dan pantai

b. RTH Privat Yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH Alami	Ekologis Sosial Budaya	Pola Ekologis	RTH Publik
	RTH Non Alami	Estetika Ekonomi	Pola Planologis	RTH Privat

Secara fisik Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti lapangan olahraga, taman, pemakan dan jalur-jalur hijau. Dilihat dari fungsi, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat berfungsi sebagai ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. (Dwiyanto, A, 2009)

Secara struktur ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, dan tersebar). Dari segi kepemilikan, Ruang Terbuka Hijau (RTH)

dibedakan ke dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat. Pembagian jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat adalah sebagaimana dijeleaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Klasifikasi Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH)

No	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		✓
	b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		✓
	c. Taman atap bangunan		✓
2	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	✓	✓
	b. Taman RW	✓	✓
	c. Taman kelurahan	✓	✓
	d. Taman kecamatan	✓	✓
	f. Hutan kota	✓	
	g. Sabuk hijau (green belt)	✓	
	h. Taman kota	✓	
3	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	✓	✓
	b. Jalur pejalan kaki	✓	✓
	c. Ruang dibawah jalan layang	✓	

No	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
4	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	✓	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	✓	
	c. RTH sempadan sungai	✓	
	d. RTH sempadan pantai	✓	
	e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air	✓	
	f. Pemakaman	✓	

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, No :05/PRT/M/2008

Adapun jenis-jenis RTH yang terdapat di kawasan perkotaan berdasarkan permendagri Nomor 1 Tahun 2007,

Yaitu:

a. Taman Kota

Taman kota merupakan ruang di dalam kota yang ditata untuk menciptakan keindahan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi penggunanya. Selain itu, taman kota difungsikan sebagai paru-paru kota, pengendali iklim mikro, konservasi tanah dan air, dan habitat berbagai flora dan fauna. Apabila terjadi suatu bencana, maka taman kota dapat difungsikan sebagai tempat posko pengungsian

(evakuasi). Pepohonan yang ada dalam taman kota dapat memberikan manfaat keindahan, penangkal angin, dan penyaring cahaya matahari. Taman kota berperan sebagai sarana pengembangan budaya kota, pendidikan, dan pusat kegiatan kemasyarakatan.

b. Taman Wisata Alam

Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Kawasan ini dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

c. Taman Rekreasi

Taman rekreasi merupakan tempat rekreasi yang berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan berorientasi pada penggunaan sumberdaya alam seperti air, hujan, pemandangan alam atau kehidupan di alam bebas. Kegiatan rekreasi dibedakan menjadi kegiatan yang bersifat aktif dan pasif. Kegiatan yang cukup aktif seperti piknik, olah raga, permainan, dan sebagainya melalui penyediaan sarana-sarana permainan.

d. Taman Lingkungan Perumahan Dan Permukiman

Taman lingkungan perumahan dan permukiman merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan rekreasi terbatas yang meliputi populasi terbatas/masyarakat sekitar. Taman ini mempunyai fungsi sebagai paru-paru kota (sirkulasi udara dan penyinaran), peredam kebisingan, menambah keindahan visual, area interaksi, rekreasi, tempat bermain, dan menciptakan kenyamanan lingkungan.

e. Taman Lingkungan Perkantoran Dan Gedung Komersial

Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan terbatas yang meliputi populasi terbatas/pengunjung. Taman ini terletak di beberapa kawasan institusi, misalnya pendidikan dan kantor-kantor. Institusi tersebut membutuhkan RTH pekarangan untuk tempat upacara, olah raga, area parkir, sirkulasi udara, keindahan dan kenyamanan waktu istirahat belajar atau bekerja.

f. Taman Hutan Raya

Kawasan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Kawasan taman hutan raya dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

g. Hutan Kota

Hutan kota terdapat dua pendekatan yang dapat dipakai. *Pendekatan pertama*, hutan kota dibangun pada lokasi-lokasi tertentu saja. Pada bagian ini, hutan kota merupakan bagian dari suatu kota. Penentuan luasnya pun dapat berdasarkan :

1. Prosentase, yaitu luasan hutan kota ditentukan dengan menghitungnya dari luasan kota.
2. Perhitungan per kapita, yaitu luasan hutan kota ditentukan berdasarkan jumlah penduduknya.
3. Berdasarkan isu utama yang muncul. Misalnya untuk menghitung luasan hutan kota pada suatu kota dapat

dihitung berdasarkan tujuan pemenuhan kebutuhan akan oksigen, air, dan kebutuhan lainnya.

Pendekatan kedua, semua areal yang ada di suatu kota pada dasarnya adalah areal untuk hutan kota. Pada pendekatan ini, komponen yang ada di kota seperti pemukiman, perkantoran, dan industri dipandang sebagai suatu enklave (bagian) yang ada dalam suatu hutan kota. Berdasarkan PP No. 63 Tahun 2002, hutan kota didefinisikan sebagai suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat dengan luas minimal sebesar 0.25 ha dalam satu hamparan yang kompak (hamparan yang menyatu). Taman hutan raya, kebun raya, kebun binatang, hutan lindung, arboretum, dan bum perkemahan yang berada di wilayah kota atau kawasan perkotaan dapat diperhitungkan sebagai luasan kawasan yang berfungsi sebagai hutan

kota. Hutan kota juga mempunyai beberapa fungsi seperti memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Hutan kota dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata alam, rekreasi, olah raga, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelestarian plasma nutfah, dan budidaya hasil hutan bukan kayu. Hal-hal tersebut dapat dilakukan selama tidak mengganggu fungsi hutan kota.

h. Hutan Lindung

Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

i. Bentang Alam Seperti Gunung, Bukit, Lereng Dan Lembah

RTH bentang alam adalah ruang terbuka yang tidak dibatasi oleh suatu bangunan dan berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;

pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara; tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati; pengendali tata air; dan sarana estetika kota.

j. Cagar Alam

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Sesuai fungsinya, kawasan cagar alam ini dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budaya.

k. Kebun Raya

Kebun raya adalah suatu area kebun yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan terutama untuk keperluan penelitian. Selain itu, kebun raya juga digunakan sebagai sarana wisata dan pendidikan bagi pengunjung. Dua buah bagian utama dari sebuah kebun raya adalah perpustakaan dan herbarium yang memiliki koleksi tumbuh-

tumbuhan yang telah dikeringkan untuk keperluan pendidikan dan dokumentasi.

I. Kebun Binatang

kebun binatang adalah tempat dimana hewan dipelihara dalam lingkungan buatan serta dipertunjukkan kepada publik. Selain menyuguhkan atraksi kepada pengunjung dan memiliki berbagai fasilitas rekreasi, kebun binatang juga mengadakan program-program pembiakan, penelitian, konservasi, dan pendidikan.

m. Pemakaman Umum

Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia. Pemakaman umum juga memiliki fungsi lainnya seperti cadangan RTH, daerah resapan air, dan paru-paru kota. Lahan pemakaman selain digunakan untuk tempat pemakaman, umumnya memiliki sedikit lahan untuk ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan.

n. Lapangan Olah Raga

Lapangan olahraga merupakan lapangan yang dibangun untuk menampung berbagai aktifitas olahraga seperti sepak bola, voli, atletik, dan golf serta sarana-sarana

penunjangnya. Fungsi lapangan olahraga adalah sebagai wadah olahraga, tempat bermain, pertemuan, sarana interaksi dan sosialisasi, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya.

o. Sempadan Sungai, Pantai, Bangunan, Situ Dan Rawa

Sempadan adalah RTH yang berfungsi sebagai batas dari sungai, danau, waduk, situ, pantai, dan mata air atau bahkan kawasan limitasi terhadap penggunaan lahan disekitarnya. Fungsi lain dari sempadan adalah untuk menyerap aliran air, perlindungan habitat, dan perlindungan dari bencana alam. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, mengamankan aliran sungai, dan dikembangkan sebagai area penghijauan. PP Nomor 26 Tahun 2008 menetapkan kriteria-kriteria sempadan sungai, yaitu:

1. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;

2. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
3. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

p. Jalur Pengaman Jalan, Median Jalan, Rel Kereta Api, Pipa Gas Dan Pedestrian .

Jalur hijau jalan adalah pepohonan, rerumputan, dan tanaman perdu yang ditanam pada pinggiran jalur pergerakan di samping kirikanan jalan dan median jalan. RTH jalur pengaman jalan terdiri dari RTH jalur pejalan kaki, taman pulo jalan yang terletak di tengah persimpangan jalan, dan taman sudut jalan yang berada di sisi persimpangan jalan. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah yang berfungsi mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas. Beberapa fungsi jalur hijau jalan yaitu sebagai penyegar udara, peredam kebisingan, mengurangi pencemaran polusi kendaraan, perlindungan bagi pejalan kaki dari hujan dan sengatan matahari, pembentuk citra kota, dan mengurangi peningkatan suhu

udara. Selain itu, akar pepohonan dapat menyerap air hujan sebagai cadangan airtanah dan dapat menetralsir limbah yang dihasilkan dari aktivitas perkotaan.

q. Kawasan Dan Jalur Hijau

Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu di wilayah perkotaan dan memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. RTH kawasan berbentuk suatu areal dan *non-linear* dan RTH jalur memiliki bentuk koridor dan *linear*. Jenis RTH berbentuk areal yaitu hutan (hutan kota, hutan lindung, dan hutan rekreasi), taman, lapangan olah raga, kebun raya, kebun pembibitan, kawasan fungsional (perdagangan, industri, permukiman, pertanian), kawasan khusus (hankam, perlindungan tata air, dan plasma nutfah). Sedangkan RTH berbentuk jalur yaitu koridor sungai, sempadan danau, sempadan pantai, tepi jalur jalan, tepi jalur kereta, dan sabuk hijau.

r. Daerah Penyangga (*Buffer Zone*) Lapangan Udara

Daerah penyangga adalah wilayah yang berfungsi untuk memelihara dua daerah atau lebih untuk beberapa alasan. Salah satu jenis daerah penyangga adalah daerah penyangga lapangan udara yang berfungsi untuk

peredam kebisingan, melindungi lingkungan, menjaga area permukiman dan komersial di sekitarnya apabila terjadi bencana, dan lainnya.

s. Taman Atap (*Roof Garden*)

Taman atap adalah taman yang memanfaatkan atap atau teras rumah atau gedung sebagai lokasi taman. Taman ini berfungsi untuk membuat pemandangan lebih asri, teduh, sebagai insulator panas, menyerap gas polutan, mencegah radiasi ultraviolet dari matahari langsung masuk ke dalam rumah, dan meredam kebisingan. Taman atap ini juga mampu mendinginkan bangunan dan ruangan dibawahnya sehingga bisa lebih menghemat energi seperti pengurangan pemakaian AC. Tanaman yang sesuai adalah tanaman yang tidak terlalu besar dengan sistem perakaran yang mampu tumbuh pada lahan terbatas, tahan hembusan angin, dan tidak memerlukan banyak air.

Taman atap mempunyai dua fungsi, yaitu bersifat intensif, di mana kegiatan yang dilakukan didalamnya aktif dan variatif serta menampung banyak orang. Fungsi yang kedua bersifat ekstensif, yaitu mempunyai satu jenis

kegiatan dan tidak melibatkan banyak orang atau bahkan tidak diperuntukkan untuk kegiatan manusia.

Menurut Permendagri No.1 Tahun 2007, berdasarkan letak lokasi ruang terbuka hijau dapat dibagi menjadi:

a. Ruang terbuka hijau dikembangkan sesuai dengan kawasan-kawasan peruntukan ruang kota, yaitu:

- Kawasan permukiman kepadatan tinggi.
- Kawasan permukiman kepadatan sedang.
- Kawasan permukiman kepadatan rendah.
- Kawasan industry.
- Kawasan perkantoran.
- Kawasan sekolah/kampus perguruan tinggi.
- Kawasan perdagangan.
- Kawasan jalur jalan.
- Kawasan jalur sungai.
- Kawasan jalur pesisir pantai dan kawasan pengamanan utilitas.

2. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Permukiman

Ruang terbuka hijau kawasan permukiman Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mendefinisikan perumahan sebagai kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau

lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Sedangkan pemukiman diartikan sebagai bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.

Menurut Van FC dalam Grove dan Gresswell, 1983 Ruang Terbuka Hijau merupakan Fasilitas yang memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, dan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam kegiatan rekreasi. Mutia (2014) menyatakan bahwa Ruang terbuka hijau lingkungan perumahan merupakan bagian daripada bangunan perumahan dalam suatu lingkungan itu sendiri. Hal ini dimaksudkan karena ruang terbuka pada dasarnya merupakan suatu wadah yang dapat menampung kegiatan dan aktifitas dari warga setempat atau secara berkelompok.

Demikian pula menurut Undang-undang bangunan gedung No. 28 Tahun 2002 yang mengatur tentang koefisien daerah hijau, RTH merupakan perangkat kendali utama bagi masyarakat atau swasta dalam membangun. Penyediaan RTH

diatur pula dalam peraturan menteri PU No: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Jurnal Standarisasi Vol. 13, NO. 1 Tahun 2011: 35-44 perkotaan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan. Sedangkan pengaturan rinci yang menyertai peraturan di atas tersebut, diantaranya tercantum pada SNI- 03-1733- 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di perkotaan yang menetapkan luasan minimum RTH lingkungan berdasarkan jumlah penduduk pendukung, kebutuhan luasan hijau per orang dan radius pencapaiannya.

Penyediaan ruang terbuka hijau pada suatu kota tidak selalu berasal dari pemerintah, seperti penyediaan RTH kota, hutan kota, jalur hijau, dan lainnya. Namun, penyediaan ruang terbuka hijau juga dapat dihadirkan pada lahan privat milik masyarakat maupun swasta. Sebagai salah satu bentuk peran keikutsertaan masyarakat dalam penyediaan ruang terbuka hijau kota adalah keberadaan RTH pemukiman. Baik dalam bentuk RTH lingkungan maupun penghijauan pekarangan rumah. Penyelenggaraan ruang terbuka hijau di pemukiman, terutama di perkotaan, dapat berfungsi secara estetis,

hidrologis, klimatologis, protektif maupun sosial budaya (Hastuti, 2011).

Pada suatu perumahan, kebutuhan akan ruang terbuka hijau (RTH) merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diwujudkan karena sebagai penghijauan pada kawasan atau perumahan tersebut. Pada beberapa kompleks perumahan ruang terbuka hijau (RTH) bisa difungsikan sebagai penanda/symbol area perumahan tersebut yang bisa dimanfaatkan sebagai area untuk bermain dan juga area untuk berkumpul bersama keluarga teman, dan bias juga dijadikan tempat untuk berekreasi. Dalam perkembangannya, masyarakat berusaha untuk mengoptimalkan ruang untuk kebutuhan dan aktivitas mereka, terutama kebutuhan ruang untuk perumahan sehingga terjadi persaingan penggunaan lahan yang mengakibatkan berkurangnya ruang untuk kebutuhan ruang terbuka publik. Kehadiran ruang terbuka publik sangat penting untuk menunjang kualitas lingkungan dan juga merupakan sarana pembentuk serta membina mental masyarakat dengan keberadaan ruang terbuka publik pada lingkungan perumahan. Meskipun hanya sebagai fasilitas penunjang, ruang terbuka publik menjadi bagian penting dan

sangat perlu diperhatikan dalam pembangunan terhadap suatu pengembangan kawasan perumahan.

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

Konsep teori perencanaan kota Melville (1999:117), yang mengatakan Melville (1999:90) bahwa perencanaan kota merupakan hasil dari dua kelompok yang sama-sama memiliki kekuatan, yaitu pemerintah dan non pemerintah. Pemerintah merupakan struktur perwakilan dan administrasi dalam bentuk organisasi yang resmi dan berkekuatan hukum untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan kota. Non pemerintah terdiri atas berbagai kekuatan yang bukan merupakan bagian dari pemerintah resmi, tetapi bagaimanapun juga memiliki pengaruh atau menentukan perencanaan kota. Keterkaitan antara kedua kekuatan tersebut dalam rangka menentukan bentuk perencanaan kota, sangat berbeda-beda dengan antar masyarakat, antar sistem politik dan antar kurun waktu sepanjang sejarah.

Namun demikian, biasanya perencanaan kota merupakan hasil dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi dan individu-individu, baik di dalam, maupun diluar pemerintah. Selain itu konsep faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan RTH oleh Zoer'aini (2005:5), yang mengemukakan

rencana pembangunan diperkotaan, khususnya pemukiman, memerlukan persiapan perancangan kota yang seimbang dengan lingkungan, seperti menyiapkan bentuk dan struktur hutan kota, jika perencanaan yang sudah teratur dan baik dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan semula, namun di dalam pelaksanaannya, banyak yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, misalnya taman dan jalur hijau pun dibangun menjadi gedung-gedung, seperti pompa bensin, bangunan sekolah, kantor dan lain-lain sebagainya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- a. Pertambahan penduduk yang sangat cepat;
- b. Perencanaan pembangunan yang tidak matang dan selalu ketinggalan;
- c. Persepsi para perancang dan pelaksana belum sama dan belum berkembang;
- d. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan;
- e. Kebutuhan pembangunan yang sangat mendesak, dan;
- f. Para perencana yang belum berwawasan lingkungan dengan tidak berpandangan kedepan. (Zoer'aini,2005:5)

Faktor-faktor tersebutlah yang termasuk penyebab dari kurang tersedianya ruang terbuka hijau. Permasalahan

ketersediaan RTH kota secara Ideal disebabkan oleh (Purnomohadi, 1995 dan KLH, 2001 dalam Widodo 2012:41).

1. Inkonsistensi kebijakan dan strategi Penataan Ruang Kota, kurangnya pengertian dan perhatian akan urgensi eksistensi RTH dalam kesatuan wilayah perkotaan. Perencanaan strategis pembangunan RTH di daerah belum memadai, karena dianggap sebagai ruang publik (*commom property*) yang secara ekonomis tidak menguntungkan sehingga saling melepas tanggung jawab.
2. Pemeliharaan RTH tidak konsisten dan tidak rutin. RTH sering dianggap sebagai tempat sampah, gubuk liar dan sarang vector pembawa penyakit, sehingga cenderung lebih menjadi masalah disbanding dengan manfaat.
3. Kurangnya pemahaman butir (1), berakibat tidak tersedianya RTH yang memadai, semakin mengurangi peluang bagi warga kota, terutama anak-anak, remaja, wanita, manusia usia lanjut dan penyandang cacat, untuk mendapat pendidikan dan pelajaran tentang kehidupan langsung dari alam sekitar, serta fasilitas olahraga, berekreasi dan bermain.
4. Pencemaran ekosistem perkotaan terhadap media tanah, air, dan udara semakin meningkat dan menimbulkan penyakit fisik dan psikis yang serius. (Purnomohadi, 1995 dan KLH, 2001 dalam Widodo 2012:41).

G. Pengertian Lahan dan Penggunaan Lahan

Lahan adalah areal atau kawasan yang diperuntukan untuk penggunaan tertentu yang besarnya dinyatakan dalam satuan hektar (Ha). Sedangkan pola penggunaan lahan adalah areal model atau bentuk penggunaan lahan diterapkan, seperti perladangan, tegalan hutan, penghijauan, perkampungan, dan lain – lain. Haeruddin, (1999 : 5) dalam Samsir, (2000 : 4).

Pengertian lahan menurut Sugandhy adalah permukaan bumi tempat berlansungnya berbagai aktivitas dan merupakan sumber daya alam yang terbatas, yang penggunaannya memerlukan penataan, penyediaan, dan peruntukannya secara berencana untuk maksud-maksud penggunaan bagi kesejahteraan masyarakat (Sugandhy dalam Pangarso, 2001:16).

Pengertian lahan menurut kamus tata ruang, lahan adalah tanah/lahan terbuka yang dihubungkan dengan arti atau fungsi sosio-ekonominya bagi masyarakat yang dapat berupa tanah/lahan terbuka, tanah/lahan garapan maupun tanah/lahan yang belum diolah atau diusahakan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa lahan merupakan suatu bentang alam sebagai modal utama kegiatan, sebagai tempat dimana seluruh makhluk hidup berada dan melangsungkan kehidupannya dengan memanfaatkan lahan

itu sendiri. Sedangkan penggunaan lahan adalah suatu usaha pemanfaatan lahan dari waktu ke waktu untuk memperoleh hasil.

Adapun pengertian penggunaan lahan menurut Jayadinata: Selaras dengan perkembangan kota dan aktivitas penduduknya maka lahan di kota terpetak-petak sesuai dengan peruntukannya. Tata guna tanah perkotaan menunjukkan pembagian dalam ruang dan peran kota. Misalnya kawasan perumahan, kawasan tempat bekerja, kawasan pertokoan dan kawasan rekreasi. (Jayadinata, 1999:54)

Penggunaan lahan menurut Webster Penggunaan lahan menurut (Webster, 1990:23), penggunaan lahan perkotaan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. lahan permukiman, meliputi perumahan termasuk pekarangan dan lapangan olah raga;
2. Lahan jasa, meliputi perkantoran pemerintah dan swasta, sekolahan, puskesmas dan tempat ibadah;
3. Lahan perusahaan, meliputi pasar, toko, kios dan tempat hiburan; dan
4. Lahan industri, meliputi pabrik dan percetakan.

H. Peran Serta Masyarakat

Keberadaan RTH sangat berperan dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Jika dipandang dari fungsinya, maka

ruang terbuka hijau dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik atau ruang tempat berinteraksi manusia, ruang publik berkembang sejalan dengan kebutuhan manusia dalam melakukan kegiatan bersama baik berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan budaya (Darmawan,2006), Nilai-nilai yang terkandung dalam RTH meliputi nilai ekologis dan alam, nilai psikologis, nilai sosial-budaya serta nilai estetika. Nilai ekologis dari RTH adalah sebagai tempat yang menyediakan udara segar, menyerap gas karbondioksida (CO₂), menahan angin dan dapat mengurangi tingkat kebisingan yang disebabkan oleh kendaraan ataupun sumber lainnya. (Wijanarko,2006)

Nilai psikologis dari RTH adalah sebagai tempat berkumpul keluarga, tempat bermain anak-anak, serta dapat dijadikan sebagai tempat untuk melepaskan lelah atau stress. Nilai sosial- budaya yang terkandung dalam RTH adalah sebagai tempat atau ruang untuk interaksi sosial antar masyarakat sehingga nilai sosial dapat tumbuh dan berkembang pada RTH. Ruang terbuka hijau merupakan pertemuan antara sistem alam dan manusia dalam lingkungan perkotaan (Astari, 2012).

Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari penataan ruang suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya,

ekonomi, dan estetika, serta berfungsi sebagai kawasan lindung. (Shani,2015). RTH dibangun dari kumpulan tumbuhan dan tanaman atau vegetasi yang telah diseleksi dan disesuaikan dengan lokasi serta rencana dan rancangan peruntukannya. Lokasi yang berbeda dan akan memiliki permasalahan yang juga berbeda yang selanjutnya berkonsekuensi pada rencana dan rancangan RTH yang berbeda.

Peningkatan jumlah penduduk berakibat pada peningkatan kebutuhan akan barang publik (Sidarta, 1993:20). Barang publik dalam hal ini adalah sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat kota. Peningkatan kebutuhan sering tidak dapat dipenuhi secara baik oleh pemerintah karena keterbatasan yang dimilikinya. Untuk itulah perlu dilakukan kerjasama pemerintah dan warga kota dalam penyediaan barang publik.

Bentuk kerjasama yang pernah dilakukan di Perancis (Sidarta, 1993:21) yaitu:

a. *Konsesi (concessions)*

Swasta diberi hak membangun sarana , mengoprasikannya, dan menarik retribusi dengan tarif ditentukan pemerintah (concessions umumnya dalam rangka waktu lebih dari 10 tahun)

b. *After Marge*

Suatu bentuk kerja sama antara swasta pemerintah, misalnya sarana dibangun pemerintah, swasta mengoperasikannya, jumlah presentase pembiayaan bergantung pada sarana yang akan diafer-marge.

Mengingat fungsinya sebagai fasilitas umum yang digunakan untuk kepentingan umum, taman tidak dapat dijadikan objek kerjasama yang berorientasi ekonomis. Pengelolaan taman oleh swasta tidak dapat dijadikan sumber pendapatan bagi swasta tersebut. Imbalan yang dapat diberikan sebagai hasil kerjasama adalah imbalan yang tidak berupa uang, seperti media promosi, kemudahan dalam pekerjaan atau penghargaan, cara lainnya dengan memberi nama taman tersebut dengan nama donatur pemeliharaan taman. Hal ini berfungsi sebagai salah satu kontrol sosial pelaku bisnis yang menjadi donatur (Suara Pembaharuan, 20 Juli 1997).

Menurut Nazaruddin (1996:14) Bentuk kerjasama yang dilakukan dalam pengelolaan taman adalah pelibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi. Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan adalah menjaga lingkungan taman dengan tidak merusak dan mencabut tanaman.

Tujuan akhir penataan ruang, baik RTRW maupun RTR Kawasan dan RRTR adalah untuk kepentingan seluruh lapisan

masyarakat. Lebih lanjut apabila tindakan-tindakan diambil untuk kepentingan masyarakat dan apabila masyarakat diharapkan untuk menerima dan patuh pada tindakan tersebut, maka masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dan mengutarakan pendapatnya. (Hardjasoemantri, 1991)

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu faktor pentingnya guna mengurangi potensi timbulnya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang. Peran serta masyarakat dapat dipandang sebagai suatu upaya untuk membantu negara dan lembaga lembaganya guna melaksanakan tugas dengan cara yang lebih dapat diterima. (Nadia, 2015)

Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang. Peran masyarakat diartikan sebagai partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Peran masyarakat dalam kegiatan penataan ruang ini juga telah diamanatkan dalam UUNo26/2007 tentang Penataan Ruang yang selanjutnya diatur dalam PerPemerintah no 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. Tujuan pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang adalah:

1. Menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
2. Mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang;
3. Menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang;
4. Mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang.

Untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, pemerintah terus melakukan berbagai cara untuk meningkatkan peran serta masyarakat dengan mendorong melakukan kerjasama pembangunan ruang

terbuka hijau dengan institusi-institusi yang memiliki program tanggung jawab dan lingkungan (*corporate social responsibility*) yang menjadikan pembangunan dan pengembangan RTH melibatkan semua unsur masyarakat. Memberikan insentif kepada warga yang bersedia menjadikan seluruh atau sebagian lahan miliknya sebagai lahan RTH, baik publik maupun privat.

Adapun Peran masyarakat dalam pengelolaan RTH diantaranya:

1. Menjaga keberadaan RTH dengan cara:
 - a. Tidak membangun pada jalur sempadan sungai;
 - b. Tidak mengubah fungsi taman yang ada; dan
 - c. Tidak menebang pohon pada jalur hijau sempadan jalan.
2. Memelihara RTH pada Kawasan Perumahan;
3. Turut mengawasi proses pemeliharaan dan keberadaan RTH dengan memberi masukan kepada instansi pengelola jika terjadi penyimpangan penggunaan RTH;
4. Menyediakan lahan untuk penyelenggaraan RTH;
5. Memberikan bantuan dalam mengidentifikasi komponen RTH yang ada maupun yang potensial dikembangkan; dan
6. Memberikan informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan RTH

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini difokuskan pada kebutuhan Ruang Terbuka Hijau dan strategi pemenuhan ruang terbuka hijau di Kelurahan Buntusu.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan batasan waktu yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini terhitung selama 3 bulan dari Bulan Juli hingga Bulan September tahun 2020.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam memecahkan masalah, langkah yang penting adalah menentukan populasi karena menjadi sumber data sekaligus sebagai objek penelitian. Populasi adalah sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat yang berada di Kelurahan Buntusu.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling*. Menurut Sugiyono (2017:82) *Simple Random Sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu, masyarakat yang tinggal di Kelurahan Buntusu berjumlah 30 orang dan pemerintah setempat.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah data yang membentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data yang menjelaskan secara deskripsi tentang kondisi lokasi penelitian secara umum. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam

catatan lapangan. Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Data Kuantitatif merupakan informasi yang diperoleh berkaitan dengan satuan-satuan angka yang memberikan keterangan berkenaan dengan jumlah seperti ; luas wilayah, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, jumlah kebutuhan ruang terbuka hijau.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan tanpa ada perantara antara peneliti dengan objek yang akan diteliti. Seperti kondisi lokasi penelitian pada aspek kependudukan, ketersediaan lahan, kondisi sosial masyarakat serta kondisi Ruang Terbuka Hijau.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan

kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, instansi pemerintah, dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi ialah dengan melakukan observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung ditunjuk kepada objek yang menjadi sasaran penelitian. Pengamatan langsung dalam penelitian ini ditujukan untuk mengamati dan mendokumentasikan kondisi eksisting ruang terbuka hijau di Kelurahan Buntusu.

2. Wawancara dan *Interview*

Teknik pengumpulan data yang juga digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan interview. Wawancara ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.

Data-data yang bisa diperoleh melalui wawancara dan pemerintah dalam penelitian ini seperti partisipasi pihak pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap pemenuhan ruang terbuka hijau di Kelurahan Buntusu.

3. Dokumentasi

Data yang didapat selain berasal dari observasi dan wawancara juga diperoleh secara tidak langsung melalui surat kabar, buku, internet serta dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

F. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ialah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan untuk dipelajari sehingga didapatkan suatu informasi.

1. Dependent variabel (variabel terikat) : Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2. Independent variabel (variabel bebas) :
 - a. Kependudukan
 - b. Ketersediaan Lahan
 - c. Partisipasi Masyarakat

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan proses menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Metode Penelitian yang digunakan yaitu :

1. Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama. Menurut I Made Winartha, Analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan.

2. Studi Literatur digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Menurut Nazir (1998 : 112) studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topic penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tanaman atau tumbuhan yang mampu memberikan keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.
2. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.
4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
5. Lahan adalah tanah terbuka, tanah garapan, tanah yang dapat dihubungkan dengan fungsi sosial ekonominya bagi masyarakat dapat berubah tanah terbuka ataupun tanah yang belum diolah.

6. Perumahan merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan

7. Jumlah penduduk adalah penghitungan cacah penduduk perorangan dalam suatu wilayah tertentu.

8. Strategi merupakan upaya atau arahan untuk mencapai sebuah tujuan dalam perencanaan

UNIVERSITAS

BOSOWA

I. Kerangka Pikir

STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KELURAHAN



Gambar 3.1 Kerangka Pikir

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Makassar

1. Aspek Fisik Dasar

a. Letak Geografis dan Administrasi

Kota Makassar yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan terletak di Pantai Barat pulau Sulawesi berada dalam titik koordinat $119^{\circ}4'29,038''$ – $119^{\circ}32'35,781''$ Bujur Timur dan $4^{\circ}58'30,052''$ - $5^{\circ}14'0,146''$ Lintang Selatan dengan luasan 17.577 Ha. Menurut Permendagri Nomor 56 tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, luas Kota Makassar tercatat 199,26 km². Dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara: Kabupaten Maros

Sebelah Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar

Sebelah Timur: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros

Sebelah Barat: Selat Makassar

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Di bagian selatan terdiri atas

Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Makassar
Tahun 2019

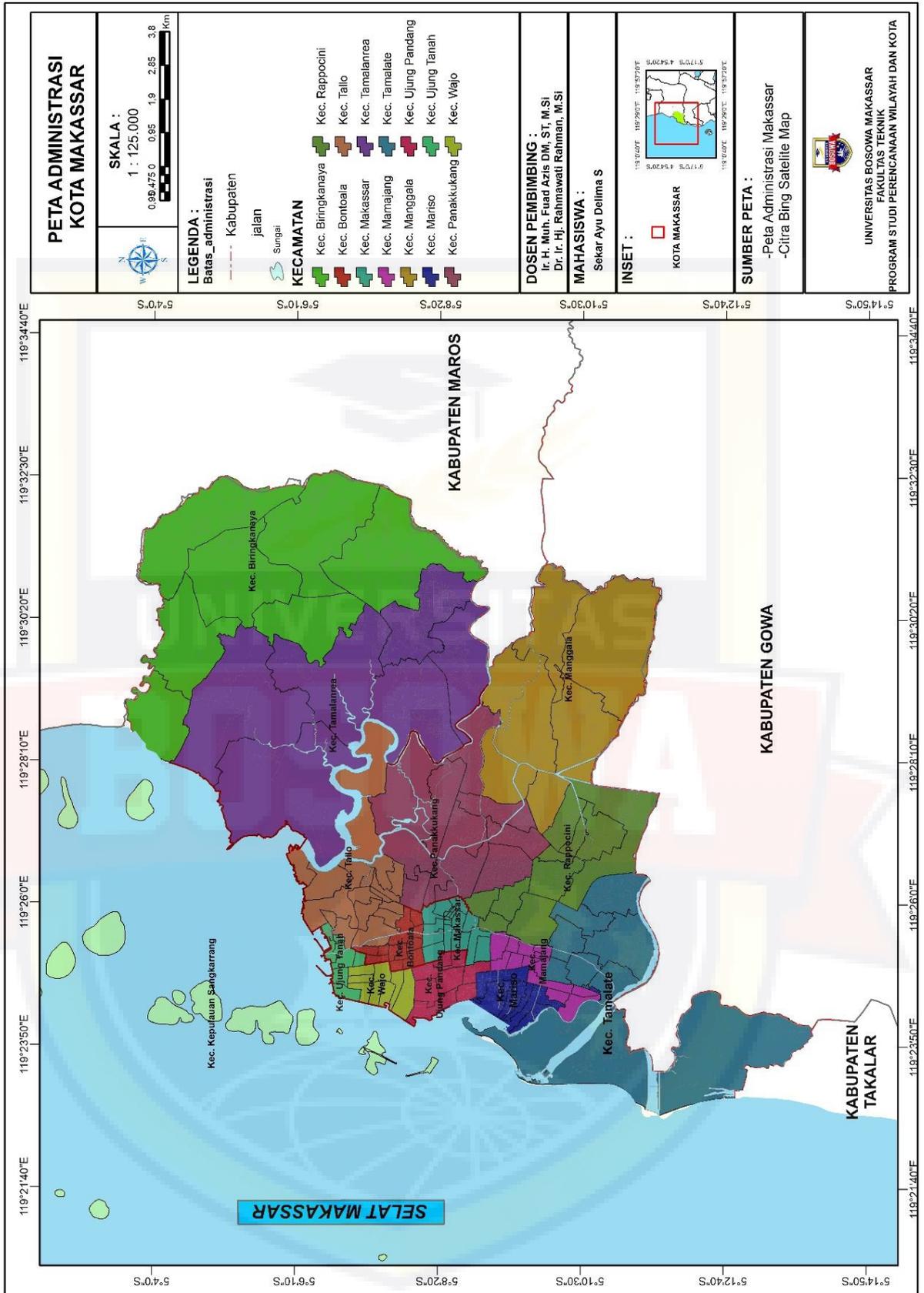
No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Mariso	1,82	1,04
2.	Mamajang	2,25	1,28
3.	Tamalate	20,21	11,50
4.	Rappocini	9,23	5,25
5.	Makassar	2,52	1,43
6.	Ujung Pandang	2,63	1,50
7.	Wajo	1,99	1,13
8.	Bontoala	2,10	1,19
9.	Ujung Tanah	4,40	2,50
10.	Kep. Sangkarang	1,54	0,88
11.	Tallo	5,83	3,32
12.	Panakkukang	17,05	9,70
13.	Manggala	24,14	13,73
14.	Biringkanaya	48,22	27,43

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
15.	Tamalanrea	31,85	18,11
	Kota Makassar	175,77	100

Sumber : Kota Makassar Dalam Angka Tahun 2020

Kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Kepulauan Sangkarang dengan luas sebesar 1,54 Km² atau 0,88% dari keseluruhan total luas wilayah Kota Makassar dan yang paling besar adalah Kecamatan Biringkanaya dengan luas 48,22 Km² atau 27,43% dari total luas keseluruhan Kota Makassar.

BOSOWA



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Makassar

b. Kondisi Topografi

Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0° - 2° (datar) dan 3° - 15° (bergelombang) dengan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-8 meter dari permukaan laut. Hal ini menyebabkan beberapa wilayah di Kota Makassar sering digenangi air pada saat musim hujan, terutama pada saat hujan turun yang disertai dengan naiknya pasang air laut.

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu pada bagian barat ke arah utara relatif lebih rendah dengan pesisir pantai dan bagian timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakkukang.

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian timur Kota. Hal ini disebabkan oleh maraknya pembangunan perumahan di bagian timur dari Kota Makassar. Adapun beberapa kecamatan di Kota Makassar yang masuk di dalam wilayah dengan tingkat pembangunan perumahan yang cukup pesat antara lain Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakkukang, dan Rappocini.

c. Kondisi Geologi

Wilayah Kota Makassar terbagi dalam berbagai morfologi bentuk lahan. Satuan-satuan morfologi bentuk lahan yang terdapat di Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- Satuan morfologi dataran aluvial pantai; dan
- Satuan morfologi perbukitan bergelombang.

Kedua satuan morfologi diatas dikontrol oleh batuan, struktur, dan formasi geologi yang ada di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Secara geologis Kota Makassar terbentuk dari batuan hasil letusan gunung api dan endapan dari angkutan sedimen Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo. Sedangkan struktur batuan yang terdapat di kota ini dapat dilihat dari batuan hasil letusan gunung api dan endapan aluvial pantai dan sungai. Struktur batuan ini penyebarannya dapat dilihat sampai ke wilayah Bulurokeng, Daya, dan Biringkanaya. Selain itu, terdapat juga tiga jenis batuan lainnya seperti breksi dan konglomerat yang merupakan batuan berkomponen kasar dari jenis batuan beku, andesit, basaltik, batu apung, dan gamping.

d. Kondisi Hidrologi

Kota Makassar memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 32 km dengan kondisi hidrologi Kota Makassar

dipengaruhi oleh 2 sungai besar yang bermuara di pantai sebelah barat kota. Kedua sungai tersebut ialah Sungai Jene'berang yang bermuara di sebelah selatan dan Sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara. Sungai Je'neberang misalnya, mengalir melintasi wilayah Kabupaten Gowa dan bermuara di bagian selatan Kota Makassar merupakan sungai dengan kapasitas sedang (debit air 1-2 m³/detik). Sedangkan Sungai Tallo dan Pampang yang bermuara di bagian utara Kota Makassar adalah sungai dengan kapasitas lebih rendah, dengan debit air yang mengalir hanya mencapai 0-5 m³/detik di musim kemarau.

Selain itu, Kondisi hidrologi Kota Makassar juga turut dipengaruhi oleh sistem hidrologi saluran perkotaan yang telah terbangun hingga saat ini. Adapun sistem hidrologi saluran perkotaan yang ada seperti kanal-kanal yang hulunya di dalam kota dan bermuara di laut.

Seiring berjalannya waktu perkembangan Kota Makassar saat ini yang terus mengalami peningkatan sehingga menyebabkan dinamika pengembangan wilayah dengan konsentrasi pembangunan yang terus berkembang di atas lahan kota yang sudah semakin sempit dan terbatas. Sebagai imbasnya tidak sedikit lahan yang terpakai saat ini

tidak sesuai dengan peruntukannya, hanya karena lahan yang dibutuhkan selain sudah terbatas, juga karena secara rata-rata konsentrasi kegiatan pembangunan cenderung hanya pada satu ruang tertentu saja.

e. Kondisi Klimatologi

Kota Makassar termasuk daerah yang beriklim tropis. Suhu udara rata-rata Kota Makassar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berkisar antara 24,5°C sampai 28,9°C dengan intensitas curah hujan yang bervariasi. Intensitas curah hujan tertinggi berlangsung antara bulan Desember hingga April.

Tingginya intensitas curah hujan menyebabkan timbulnya genangan air di sejumlah wilayah yang ada di Kota Makassar. Maka tak heran jika musim hujan tiba dan bersamaan dengan naiknya pasang air laut ada beberapa wilayah di Kota Makassar yang terkena bencana banjir. Selain itu, kurangnya daerah resapan air hujan, sampah yang menumpuk dimana-mana dan drainase yang tidak berfungsi dengan baik memicu timbulnya bencana banjir.

Tabel 4.2

Pengamatan Suhu (°C) Menurut Bulan Di Kota Makassar Tahun 2019

No.	Bulan	Suhu		
		Minimum	Rata-Rata	Maksimum
1	Januari	27,4	27,5	27,6
2	Februari	26,8	27,4	27,9
3	Maret	27,3	27,6	27,9
4	April	28,4	28,5	28,5
5	Mei	28,7	28,8	28,8
6	Juni	27,7	27,8	27,8
7	Juli	27,3	27,5	27,6
8	Agustus	27,5	27,8	28,1
9	September	28,0	28,2	28,3
10	Oktober	29,2	29,3	29,4
11	November	29,4	29,1	29,4
12	Desember	27,4	27,4	27,4

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas rata-rata suhu tertinggi terjadi di Kota Makassar sepanjang tahun 2019 ialah pada bulan Oktober dengan suhu rata-rata yaitu mencapai 29,3 °C, sedangkan rata-rata suhu terendah terjadi pada bulan Februari dan bulan Desember dengan suhu rata-rata mencapai 27,4 °C.

Suhu minimum terendah terjadi pada bulan Februari dengan suhu 26,8°C, sedangkan suhu maksimum tertinggi terjadi pada bulan Oktober dan bulan November dengan suhu mencapai 29,4°C.

Tabel 4.3
Pengamatan Tingkat Kelembaban (%) Menurut Bulan Di Kota Makassar
Tahun 2019

No.	Bulan	Suhu		
		Minimum	Rata-Rata	Maksimum
1	Januari	83	85	86
2	Februari	80	83	86
3	Maret	82	84	85
4	April	80	80	80
5	Mei	76	78	80
6	Juni	77	80	82
7	Juli	71	75	78
8	Agustus	68	69	70
9	September	73	76	78
10	Oktober	68	70	72
11	November	74	77	80
12	Desember	85	85	85

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas rata-rata tingkat kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Januari dan bulan Desember dengan tingkat kelembaban udara rata-rata mencapai 85%, sedangkan rata-rata tingkat kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Oktober dengan tingkat kelembaban udara mencapai 70%.

Kelembaban udara minimum terjadi pada bulan Agustus dan bulan Oktober sebesar 68%, sedangkan kelembaban udara maksimum terjadi pada bulan Januari dan bulan Februari sebesar 86%.

Tabel 4.4
Jumlah Curah Hujan (mm) Dan Penyinaran Matahari (%)
Kota Makassar Tahun 2019

No.	Bulan	Kecepatan Curah Hujan (mm)	Penyinaran Matahari (%)
1	Januari	642	36
2	Februari	239	62
3	Maret	445	57
4	April	354	67
5	Mei	60	81
6	Juni	61	62
7	Juli	2	88
8	Agustus	0	97
9	September	0	97
10	Oktober	0	98
11	November	78	90
12	Desember	281	69

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Januari sebesar 642 mm, sedangkan jumlah curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus, bulan September dan bulan Oktober.

Untuk tingkat penyinaran matahari tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar 98%, sedangkan tingkat penyinaran matahari terendah terjadi pada bulan Januari sebesar 36%

f. Kondisi Eksisting Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar

Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Makassar merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota yang diisi oleh tumbuhan dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan atau tidak langsung yang dihasilkan oleh Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam kota tersebut yaitu, keamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan. Berdasarkan hasil identifikasi RTH melalui aplikasi ArcGIS dengan menggunakan Citra Satelit serta diklarifikasi dengan metode survei lapangan, maka diperoleh hasil identifikasi RTH Kota Makassar tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Rekap Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar
Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (Ha)	Luas RTH (Ha)	Presentasi (%)
1.	Mariso	228.44	10.92	0.06
2.	Mamajang	241.48	8.19	0.05
3.	Tamalate	2.627.40	207.44	1.19
4.	Rappocini	1.207.32	86.66	0.50
5.	Makassar	251.06	16.12	0.09
6.	Ujung Pandang	282.64	16.17	0.09
7.	Wajo	204.11	2.53	0.01
8.	Bontoala	147.58	147.58	0.04

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (Ha)	Luas RTH (Ha)	Presentasi (%)
9.	Ujung Tanah	189.70	9.92	0.06
10.	Kep. Sangkarang	54.23	1.02	1.88
11.	Tallo	903.40	399.57	2.29
12.	Panakkukang	1.414.17	80.12	0.46
13.	Manggala	2.302.23	68.02	0.39
14.	Biringkanaya	3.163.81	247.18	1.41
15.	Tamalanrea	4.312.68	229.10	1.31
Kota Makassar		17,476	1,389	9.83

Sumber: Laporan Hasil Identifikasi RTH Kota Makassar 2019

Berdasarkan dari tabel di atas, ruang terbuka hijau di Kota Makassar pada tahun 2019 sebesar 9.83% dari total keseluruhan luas wilayah Kota Makassar. Dengan luas Ruang Terbuka Hijau sebanyak 1.389 Ha. Dari data di atas pula dapat disimpulkan bahwa kecamatan yang memiliki luas RTH yang paling tinggi ialah Kecamatan Tallo dengan luas RTH 399.57 Ha dan presentasi 2.29%. adapun kecamatan yang memiliki luas RTH paling kecil adalah Kecamatan Wajo dengan luas RTH 2.53 Ha dan presentasi 0.01%

2. Aspek Kependudukan

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar dan penting dalam perencanaan wilayah dan kota. Dinamika penduduk yang tinggal dan beraktivitas di dalamnya menjadikan kota/ wilayah berkembang. Dinamika tersebut

mencakup peristiwa-peristiwa demografi seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi yang dapat mempengaruhi jumlah, komposisi, distribusi dan kepadatan penduduk di suatu kota/wilayah, yang pada akhirnya berdampak pada munculnya isu-isu kependudukan, seperti urbansisasi, bonus demografi, population ageing dan lainnya. Oleh karenanya, aspek kependudukan harus menjadi dasar/landasan bagi perencana untuk merumuskan perencanaan pembangunan di suatu kota/wilayah.

a. Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Pada tahun 2019 jumlah penduduk Kota Makassar menurut Kota Makassar dalam angka sebesar 1.526.677 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah proyeksi penduduk tahun 2018, penduduk Kota Makassar mengalami pertumbuhan sebesar 1,23%. Kepadatan penduduk di Kota Makassar tahun 2019 mencapai 8.686 jiwa/km². yang dimana Kecamatan Biringkanaya merupakan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 208.436 jiwa dengan kepadatan mencapai 4.323 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.6. berikut.

Tabel 4.6
Distribusi dan Tingkat Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan Kota Makassar
Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ km ²)
1	Mariso	60.499	1,82	33.241
2	Mamajang	61.452	2,25	27.312
3	Tamalate	205.541	20,21	10.170
4	Rappocini	170.121	9,23	18.431
5	Makassar	85.515	2,52	33.935
6	Ujung Pandang	29.054	2,63	11.047
7	Wajo	31.453	1,99	15.806
8	Bontoala	57.197	2,1	27.237
9	Ujung Tanah	35.534	4,4	8.076
10	Kep. Sangkarang	14.531	1,54	9.436
11	Tallo	140.330	5,83	24.070
12	Panakkukang	149.664	17,05	8.778
13	Manggala	149.487	24,14	6.193
14	Biringkanaya	220.456	48,22	4.572
15	Tamalanrea	115.843	31,85	3.638
Jumlah		1.526.677	175,77	8.686

Sumber : Kota Makassar Dalam Angka Tahun 2020

b. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk Kota Makassar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 1.526.677 jiwa. yang terdiri

atas 737.146 jiwa penduduk laki -laki dan 751.865 jiwa penduduk perempuan. Untuk rasio paling tinggi berada di Kecamatan Mariso dengan 102 dan terendah di Kecamatan Ujung Pandang dengan rasio sebesar 89. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut,

Tabel 4.7
Distribusi Penduduk menurut Rasio Jenis Kelamin
Di Kota Makassar menurut Kecamatan
Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jenis Kela		Jumlah	Rasio
		min			
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Mariso	30.385	29.745	60.130	102
2	Mamajang	30.076	31.262	61.338	96
3	Tamalate	100.320	101.588	201.908	98
4	Rappocini	81.399	85.946	168.345	93
5	Makassar	42.425	42.886	85.311	98
6	Ujung Pandang	13.641	15.242	28.696	89
7	Wajo	15.382	15.915	31.297	96
8	Bontoala	27.810	29.199	57.009	95
9	Ujung Tanah	17.939	17.415	35.354	103
10	Kep.Sangkarang	7.258	7.258	14.458	100
11	Tallo	70.183	69.840	140.023	100
12	Panakkukang	73.756	75.365	149.121	97
13	Manggala	73.267	72.606	145.873	100
14	Biringkanaya	107.100	107.332	214.432	99
15	Tamalanrea	56.068	58.604	114.672	95
Jumlah		746.951	761.203	1.508.154	98

Sumber : Kota Makassar Dalam Angka Tahun 2018

c. Laju Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan penduduk Kota Makassar setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kota Makassar mengalami pertumbuhan sebesar 1,32 persen. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8
Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan Di Kota Makassar Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
		2016	2017	2019	2016-2017	2018-2019
1	Mariso	59.292	59.721	60.499	0,72	0,61
2	Mamajang	61.007	61.186	61.452	0,29	0,19
3	Tamalate	194.493	198.210	205.541	1,91	1,80
4	Rappocini	164.563	166.480	170.121	1,16	1,05
5	Makassar	84.758	85.052	85.515	0,35	0,24
6	Ujung Pandang	28.497	28.696	29.054	0,70	0,59
7	Wajo	30.933	31.121	31.453	0,61	0,50
8	Bontoala	56.536	56.784	57.197	0,44	0,33
9	Ujung Tanah	49.223	49.528	35.534	0,62	0,51
10	Kep. Sangkarang	-	-	14.531	-	0,50
11	Tallo	139.167	139.624	140.330	0,33	0,22
12	Panakkukang	147.783	148.482	149.664	0,47	0,36

13	Manggala	138.659	142.252	149.487	2,59	2,48
14	Biringkanaya	202.520	208.436	220.456	2,92	2,81
15	Tamalanrea	112.170	113.439	115.843	1,13	1,02
Jumlah		1.469.601	1.489.011	1.526.677	1,32	1,23

Sumber : Kota Makassar Dalam Angka Tahun 2020

B. Gambaran Umum Kecamatan Tamalanrea

1. Aspek Fisik Dasar

a. Letak Geografis dan Administrasi

Kecamatan Tamalanrea merupakan salah satu dari 14 kecamatan di Kota Makassar. Luas wilayah Kecamatan Tamalanrea tercatat 31.84 km². Kecamatan Tamalanrea terdiri dari 8 kelurahan, 346 RT dan 69 RW dengan batas wilayah seperti berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Birangkanaya

Sebelah Timur : Kabupaten Maros

Sebelah Selatan : Kecamatan Panakkukang

Sebelah barat : Selat Makassar

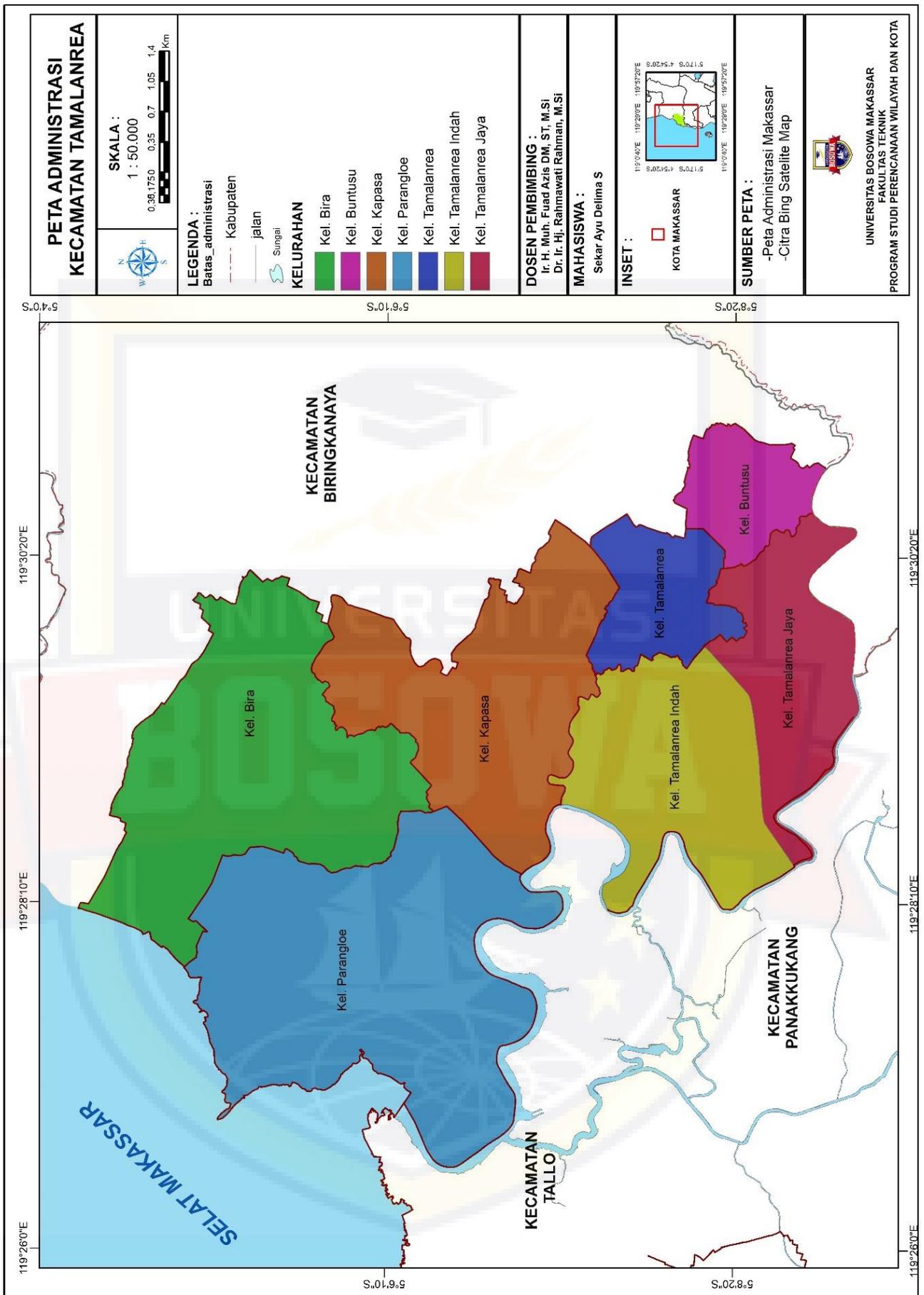
Tabel 4.9
Luas Wilayah Menurut Kelurahan Kecamatan Tamalanrea Tahun 2018

No	Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Tamalanrea Indah	4.74	14.89
2.	Tamalanrea Jaya	2.98	9.36
3.	Tamalanrea	2.02	6.35

No	Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
4.	Kapasa	2.06	6.32
5.	Parangloe	6.53	20.51
6.	Bira	9.26	29.08
7.	Buntusu	2.13	6.68
8.	Kapasa Raya	2.12	6.81
Kecamatan Tamalanrea		31.84	100

Sumber : Kecamatan Tamalanrea Dalam Angka Tahun 2019

Secara administratif, Kecamatan Tamalanrea memiliki 8 Kelurahan. Adapun luas wilayah kelurahan yang paling besar ialah Kelurahan Bira dan luas paling kecil adalah Kelurahan Tamalanrea.



Gambar 4.2 Peta Administrasi Kecamatan Tamalanrea

b. Kondisi Topografi

Tinggi wilayah Kecamatan Tamalanrea berkisar antara 0 – 8 m di atas permukaan laut. Adapun wilayah topografi Kecamatan Tamalanrea terbagi atas 2 bagian, yaitu daerah pantai dan daerah bukan pantai. Terdapat 6 kelurahan daerah bukan pantai yaitu Kelurahan Tamalanrea Indah, Tamalanrea Jaya, Tamalanrea, Kapasa, Buntusu, dan Kapasa Raya. Sedangkan 2 kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Parangloe dan Bira merupakan daerah pantai.

c. Kondisi Geologi

Jenis tanah yang ada di Kelurahan Bira terdiri dari tanah inceptisol dan tanah ultisol. Jenis tanah inceptisol tersebar hampir di seluruh Kelurahan Bira, merupakan tanah yang tergolong sebagai tanah muda dengan tingkat perkembangan lemah. Tanah ini terbentuk dari berbagai jenis macam bahan induk, yaitu aluvium (fluviatil dan marin), batu pasir, batu liat, dan batu gamping.

d. Kondisi Hidrologi

Pemanfaatan sumber daya air di Kecamatan Tamalanrea selain memanfaatkan air sungai dan air hujan, alternatif lainnya yaitu memanfaatkan air tanah. Sebagai salah satu kecamatan di Kota Makassar dengan tingkat permukiman

yang cukup padat dan juga sebagai kawasan industri, maka tak heran jika pemanfaatan air tanah cukup besar pengaruhnya untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat sehari-hari. Air tanah tentu mempunyai peranan yang cukup besar terutama dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku air untuk kepentingan rumah tangga maupun untuk kepentingan industri. Sumber air baku yang berasal dari PDAM untuk memenuhi kebutuhan air minum di Kecamatan Tamalanrea berasal dari 2 sumber yaitu dari Sungai Jeneberang dan Bendungan Lekopancing Maros.

e. Kondisi Klimatologi

Kecamatan Tamalanrea termasuk daerah yang beriklim tropis seperti Kota Makassar. Hal ini dikarenakan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea merupakan bagian dari Wilayah Kota Makassar. Suhu udara rata-rata di Kecamatan Tamalanrea dalam 10 tahun terakhir berkisar antara 24,5°C sampai 28,9°C dengan intensitas curah hujan yang bervariasi tiap tahunnya. Intensitas curah hujan tertinggi berlangsung antara bulan Desember hingga bulan April.

Tingginya intensitas curah hujan menyebabkan timbulnya genangan air di sejumlah wilayah. Selain itu, kurangnya

daerah resapan dan drainase yang tidak berfungsi dengan baik sehingga semakin memicu timbulnya bencana banjir.

f. Kondisi Eksisiting Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Tamalanrea

Adapun hasil identifikasi data yang diperoleh diketahui luas wilayah Kecamatan Tamalanrea 4.312,68 Ha dengan luas total ruang terbuka hijau yang teridentifikasi pada Tahun 2019 adalah sebesar 229,10 Ha. Berdasarkan hasil identifikasi maka diklasifikasikan jenis – jenis ruang terbuka hijau sebagai berikut:

**Tabel 4.10
Luas Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Tamalanrea
Tahun 2019**

No	Jenis RTH	Status (luas)		Total Luas (m ²)
		Publik (m ²)	Private (m ²)	
1	Taman	25.732	99.773	125.505
2	Lapangan	110.799	42.500	153.299
3	Pemukaman	53.108	-	53.108
4	Jalur Hijau	113.161	130.815	243.976
5	Bakau	346.159	-	346.159
6	Hutan Kota	617.452	-	617.452
7	Sempadan	745.290	-	745.290

Sumber: Laporan Hasil Identifikasi RTH Kota Makassar 2019

2. Aspek Kependudukan

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Kecamatan Tamalanrea berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 141.519 jiwa yang terdiri atas 69.035 jiwa penduduk laki-laki dan 62.484 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Kecamatan Tamalanrea mengalami pertumbuhan sebesar 1.01 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1.02 persen dan penduduk perempuan sebesar 1.14persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 96 persen

Tabel 4.11
Distribusi Penduduk menurut Rasio Jenis Kelamin
Di Kecamatan Tamalanrea menurut Kelurahan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tamalanrea Indah	9.143	9.230	18.373
2	Tamalanrea Jaya	9.679	10.985	20.664
3	Tamalanrea	18.300	18.782	37.082
4	Kapasa	9.634	9.904	19.538
5	Parangloe	3.438	3.521	6.959
6	Bira	5.874	6.182	12.056
7	Buntusu	12,967	13.884	26.847

8	Kapasa Raya	-	-	-
Jumlah		69.035	62.484	141.519

Sumber : Kecamatan Tamalanrea Dalam Angka Tahun 2019

b. Kepadatan Penduduk

Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kecamatan Bontoala sebesar 141,519 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 53.621 jiwa/km² yang dimana Kelurahan Tamalanrea merupakan Kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 37.082 jiwa dengan kepadatan mencapai 18.357 jiwa/km².

Tabel 4.12
Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Tamalanrea Tahun 2018

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas (Km ²)	Kepadatan Penduduk
1.	Tamalanrea Indah	18.373	4.74	3.876
2.	Tamalanrea Jaya	20.664	2.98	6.934
3.	Tamalanrea	37.082	2.02	18.357
4.	Kapasa	19.538	2.06	9.484
5.	Parangloe	6.959	6.53	1.065
6.	Bira	12.056	9.26	1.301
7.	Buntusu	26.847	2.13	12.604
8.	Kapasa Raya	-	2.12	-
Kecamatan Tamalanrea		141.519	31.84	53.621

Sumber : Kecamatan Tamalanrea Dalam Angka Tahun 2019

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

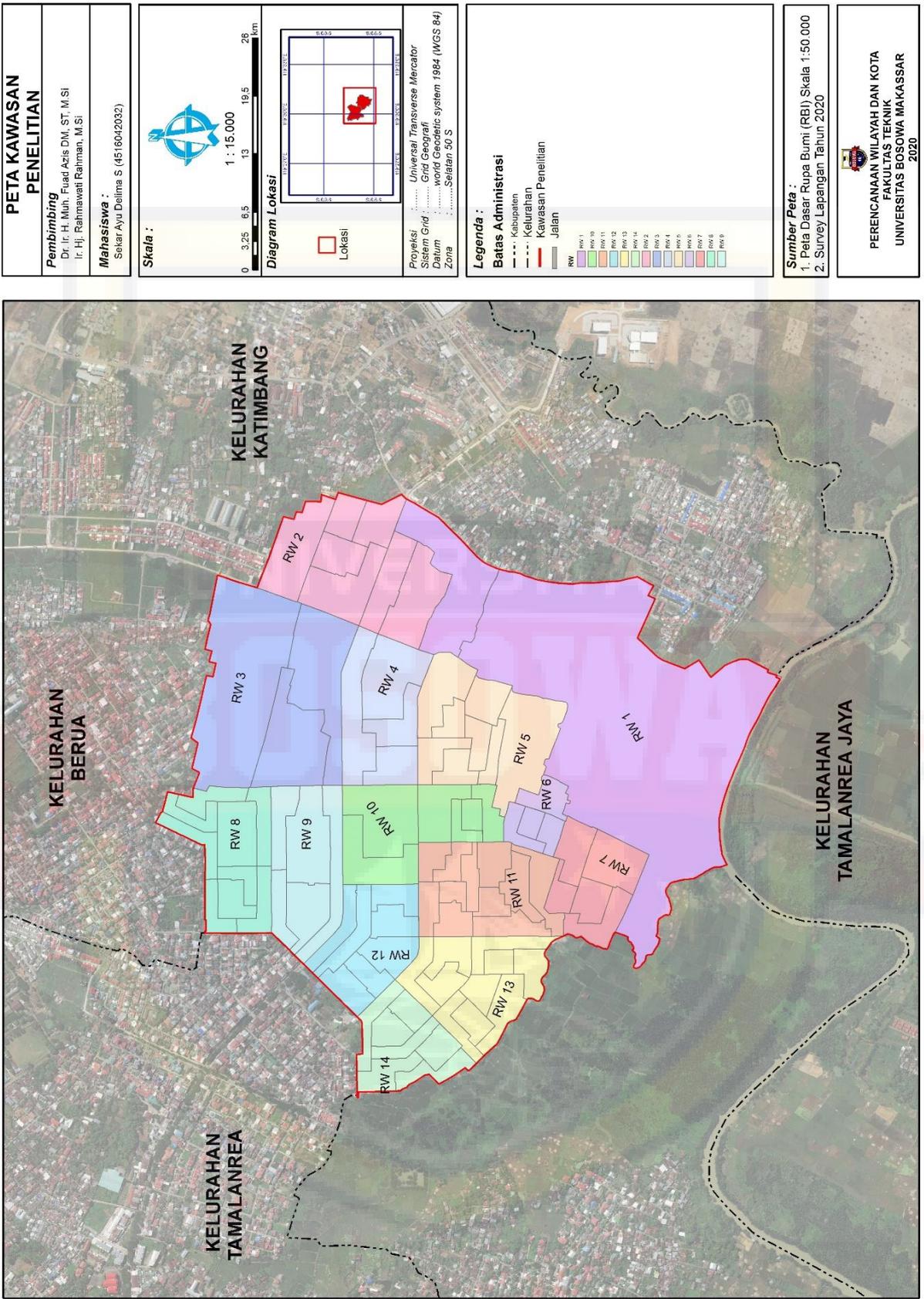
1. Aspek Fisik Dasar

a. Letak Geografis dan Administrasi

Kelurahan Buntusu merupakan salah satu dari 8 kelurahan di Kecamatan Tamalanrea dengan total luas wilayah 2.13 km². Adapun batas administrasi Kelurahan Buntusu ialah :

- Sebelah Utara : Kelurahan Tamalanrea dan Kelurahan Berua
- Sebelah Selatan: Kabupaten Maros
- Sebelah Timur : Kelurahan Katimbang
- Sebelah Barat : Kelurahan Tamalanrea Jaya

Secara administratif Kelurahan Buntusu memiliki 14 RW dan 88 RT. Kelurahan Buntusu merupakan pemekaran dari Kelurahan Tamalanrea pada tahun 2015.



Gambar 4.3 Peta Administrasi Kelurahan Buntusu

2. Aspek Kependudukan

a. Distribusi Penduduk Berdsarkan Jenis Kelamin

Kelurahan Buntusu memiliki jumlah penduduk sebanyak 26.849 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 12.965 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 13.884 jiwa.

Tabel 4.13
Distribusi Penduduk Berdsarkan Jenis Kelamin
di Kelurahan Buntusu
Tahun 2020

Kelurahan Buntusu	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
	12.965	13.884	26.849

Sumber :

Profil Kelurahan Buntusu 2020

3. Aspek Sarana

a. Sarana Pendidikan

Ketersediaan fasilitas pendidikan pada suatu wilayah merupakan suatu hal yang mutlak ada, untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Fasilitas yang dimaksud adalah sarana pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya sampai pada jenjang pendidikan menengah atas. Selain ketersediaan fasilitasnya, perlu pula ketersediaan tenaga

pengajar dan prasarana pendukung untuk menunjang tercapainya proses belajar mengajar yang optimal.

Tabel 4.14
Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kelurahan Buntusu Tahun 2020

No.	Fasilitas	Jumlah (Unit)
1	PAUD	6
2	SD	16
3	TK	8
4	SMP	5
5	SMA	5
6	Perguruan Tinggi	-
Jumlah		40

Sumber : Profil Kelurahan Buntusu 2020

Berdasarkan jumlah fasilitas pendidikan yang terdapat di Kelurahan Buntusu, terdapat beberapa jenis fasilitas pendidikan. Yang dimana PAUD sebanyak 6 unit, SD sebanyak 16 unit, SMP sebanyak 5 unit dan SMA sebanyak 5 unit dengan total 40 fasilitas pendidikan di Kelurahan Buntusu.



Gambar 4.4 Sarana Pendidikan di Kelurahan Buntusu Tahun 2020

b. Sarana Kesehatan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Tabel 4.15
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Buntusu
Tahun 2020

No.	Fasilitas	Jumlah (Unit)
1	Rumah Sakit	1
2	Rumah Bersalin	2
3	Puskesmas	1
4	Posyandu	14
5	Tempat Praktik	2
6	Apotek	7
Jumlah		27

Sumber : Kecamatan Tamalanrea Dalam Angka 2019

Berdasarkan dari data tabel di atas, terdapat 3 jenis fasilitas kesehatan di Kelurahan Buntusu. Yang dimana terdapat 1 unit Rumah sakit, 2 unit Rumah Bersalin dan 1 unit puskesmas dengan total 4 fasilitas kesehatan di Kelurahan Buntusu.



Gambar 4.5 Sarana Kesehatan di Kelurahan Buntusu Tahun 2020

c. Sarana Peribadatan

Fasilitas peribadatan merupakan fasilitas pendukung masyarakat didalam melaksanakan kewajibannya taat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ketersediaannyapun perlu menjadi sorotan umum bagi pemerintah didalam menyediakan sarana peribadatan pada wilayah bersangkutan, sehingga penduduk dapat dengan khusyuk menjalankan ibadahnya masing-masing serta dapat menjaga kerukunan antar umat beragama.

Tabel 4.16

Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kelurahan Buntusu Tahun 2020

No.	Fasilitas	Jumlah (Unit)
1	Masjid	23
2	Gereja	-
Jumlah		23

Sumber : Profil Kelurahan Buntusu 2020

Berdasarkan dari tabel di atas, hanya terdapat 1 jenis fasilitas peribadatan dengan jumlah masjid sebanyak 23 unit.



Gambar 4.6 Sarana Peribadatan di Kelurahan Buntusu Tahun 2020
d. Sarana Olahraga

Sarana olahraga merupakan sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan olahraga. Prasarana olah raga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari tempat olah raga dalam bentuk bangunan di atasnya dan batas fisik yang statusnya jelas dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program kegiatan olahraga

Tabel 4.17
Jumlah Fasilitas Olahraga di Kelurahan Buntusu
Tahun 2020

No.	Fasilitas	Jumlah (Unit)
1	Lapangan Sepak Bola	1
2	Tenis Meja	1
3	Lapangan Bulu Tangkis	1
4	Lapangan Tennis	1
Jumlah		4

Sumber : Kecamatan Tamalanrea Dalam Angka 2019

Berdasarkan dari data Statistik, terdapat 4 jenis sarana olahraga di Kelurahan Buntusu yaitu lapangan sepak bola 1 unit, tenis meja 1 unit, lapangan bulu tangkis 1 unit dan lapangan tenis 1 unit.



Gambar 4.7 Sarana Olahraga di Kelurahan Buntusu Tahun 2020

4. Aspek Prasarana

Prasarana adalah untuk melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan permukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai dengan fungsinya, upaya memperbaiki lingkungan membutuhkan keseimbangan antar tingkat kebutuhan masyarakat (Diwiryono, 1996 dalam Juliawan, 2015:6)

a. Kondisi Prasarana Jalan

Jalan merupakan urat nadi pada suatu wilayah kota maupun desa, ketersediaan prasarana jalan yang memadai memberikan kontribusi yang cukup besar pada pertumbuhan pembangunan perkotaan. Adapun manfaat jalan yang sangat berperan penting yaitu distribusi pergerakan manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya, maka pemerintah maupun masyarakat bertindak peduli terhadap kondisi serta tersedianya prasarana jalan. Di Kelurahan Buntusu terdapat jalan kolektor dengan jenis material beton, jalan lokal dengan material paving blok dan beton. Serta jalan lingkungan dengan material paving blok.



Gambar 4.8 Prasarana Jalan di Kelurahan Buntusu Tahun 2020

b. Kondisi Prasarana Drainase

Drainase merupakan tempat pembuangan air limbah atau saluran pembuangan air hujan agar dapat meminimalisir terjadinya genangan. Drainase merupakan saluran tempat pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Berdasarkan hasil survey lapangan Jaringan drainase yang terdapat di Kelurahan Buntusu yakni drainase sekunder dan drainase tersier dengan volume yang belum mampu menampung saluran air pada musim hujan sehingga menyebabkan drainase tersebut sering tergenang air. Kondisi jaringan drainase yang terdapat di Kelurahan Buntusu terdiri atas dua jenis yaitu permanen dan temporer.



Gambar 4.9 Prasarana Drainase di Kelurahan Buntusu Tahun 2020

c. Kondisi Prasarana Air Bersih

Jaringan air bersih adalah jaringan pipa saluran air yang mengalirkan air bersih ke rumah-rumah yang dilayaninya. Selain itu air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia. Berdasarkan dari hasil survei lapangan, Jaringan air bersih pada Kelurahan Buntusu diperoleh dari dua sumber yaitu dari PDAM dan sumur gali/bor, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat setempat. Dilihat dari kualitas air maka sumber air yang paling baik untuk dipergunakan adalah sumber air bersih yang berasal dari PDAM sedangkan sumber air dari sumur gali kualitas airnya masih kurang baik karena merupakan sumber air permukaan dengan kedalaman antara 3 – 15 meter

5. Kondisi Eksisting Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Buntusu

Adapun jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau yang terdapat di Kelurahan Buntusu ialah :

a. Taman

Pada Kelurahan Buntusu terdapat taman yang tersebar di beberapa RW/RT dengan luas keseluruhan 2,75 ha.



Gambar 4.10 Taman di Kelurahan Buntusu Tahun 2020

b. Lapangan

Lapangan Olahraga yang tersedia di Kelurahan Buntusu ialah Lapangan Tala' yang mencakup lapangan sepak bola, lapangan basket dan lapangan tenis di RW 07. Adapun lapangan badminton yang terdapat di RW 13. Dengan ini luas keseluruhan lapangan di Kelurahan Buntusu mencapai 1,72 ha.



Gambar 4.11 Lapangan di Kelurahan Buntusu Tahun 2020

c. Mangrove/Bakau

Ketersediaan jenis kawasan hijau mangrove yang dominan di Kelurahan Buntusu adalah jenis bakau dan nipah dengan luas lahan secara keseluruhan yaitu sebesar 4,84 ha.



Gambar 4.12 Tumbuhan Mangrove di Kelurahan Buntusu Tahun 2020

d. Jalur Hijau

Jalur Hijau yang berada pada tengah/median jalan di Kelurahan Buntusu terdapat di sepanjang jalan Kelurahan Buntusu dengan panjang jalur hijau secara keseluruhan yaitu 1330,715 m². Dimana jalur Hijau yang berada pada median tersebut yang ditanami vegetasi berupa rumput, pepohonan dan tanaman berupa bunga



Gambar 4.13 Jalur Hijau di Kelurahan Buntusu Tahun 2020

UNIVERSITAS

BOSOWA





Gambar 4.14 Peta Persebaran Eksisting RTH di Kelurahan Buntusu

Tabel 4.18**Luas Penggunaan Lahan dan Presentase Kelurahan Buntusu**

No.	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Jalan	11,91	6,88
2	Permukiman	93,61	54,15
3	Lapangan	1,72	0,99
4	Ruang Terbuka Hijau	1,05	0,60
5	Mangrove	4,84	4,84
6	Rawa	5,56	3,21
7	Sawah	24,03	18,79
8	Sungai	0,53	0,30
9	Lahan Kosong	29,46	17,38
Total		172,86	

Sumber : Kantor Kelurahan Buntusu Tahun 2020

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Deskriptif

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan amanat dari UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang dimana disyaratkan luas RTH minimal sebesar 30% dari luas wilayah kawasan perkotaan yang dibagi menjadi RTH publik minimal 20% dan RTH Privat minimal 10%. Guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya dan estetika. Pada kenyataannya Ruang Terbuka Hijau yang terdapat di Kelurahan Buntusu belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data survei lapangan, Kelurahan Buntusu memiliki total luas Ruang Terbuka Hijau sebesar 13.17 ha dengan presentase 7.59% dari luas wilayah Kelurahan Buntusu. Kondisi ini sangat jauh dari persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan ini Kelurahan Buntusu masih memerlukan 34.85 ha untuk Ruang Terbuka Hijau Publik dan 17.24 ha untuk Ruang Terbuka Hijau Privat.

Dalam penelitian ini menemukan beberapa faktor yang memengaruhi belum terpenuhinya ruang terbuka hijau di Kelurahan Buntusu. Faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap perubahan luas RTH. Sehingga semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk akan berdampak pada meningkatnya perubahan luas RTH. Pertumbuhan serta aktivitas penduduk di Kelurahan Buntusu yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dapat mengurangi luas lahan karena kebutuhan lahan untuk tempat tinggal dan lahan untuk fasilitas-fasilitas lain sebagai pendukungnya yang semakin meningkat. Sehingga kebutuhan akan ruang terbuka hijau semakin dikesampingkan.

b. Ketersediaan Lahan Kosong

Di Kelurahan Buntusu terdapat banyak lahan kosong dengan total luas 29.46 ha dan presentase 17,38% yang di mana jika lahan kosong tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik akan meningkatkan ruang terbuka hijau yang ada di Kelurahan Buntusu. Akan tetapi, lahan kosong di Kelurahan Buntusu didominasi oleh lahan privat. Dan hal inilah yang membuat pemerintah setempat kesulitan dalam menyediakan lahan untuk kepentingan umum dan ruang terbuka hijau karena lahan kosong tersebut dapat sewaktu-waktu dibangun oleh masing-masing pemiliknya.

c. Kurangnya Sosialisasi Pemerintah

Masyarakat di Kelurahan Buntusu masih banyak yang belum memahami mengenai arti pentingnya penyediaan ruang terbuka hijau dan belum mengetahui kebijakan ruang terbuka hijau. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memenuhi luasan RTH terutama RTH Privat. Dalam menambah luasan RTH.

d. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Demikian pula partisipasi masyarakat dalam penyediaan ruang terbuka hijau masih sangat kurang. Bahkan masyarakat cenderung menjadi faktor utama penurunan kuantitas ruang terbuka hijau, dengan mengubah area hijau halaman menjadi lahan terbangun atau area parkir. Untuk itu dibutuhkan kesadaran semua pihak untuk mengikuti arahan dalam RTRW Kota.

2. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Buntusu

Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau sangat dibutuhkan dan perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan fungsi dan manfaat dari Ruang Terbuka Hijau. Sehingga kota memiliki kualitas lingkungan yang baik dan memiliki daya dukung lingkungan yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan strategi

pemenuhan ruang terbuka hijau untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Pengalokasian 30% RTH ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Makassar. Proporsi tersebut bertujuan untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, ruang terbuka bagi aktivitas publik serta dapat meningkatkan nilai estetika kota. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu faktor pentingnya guna mengurangi potensi timbulnya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang. Peran serta masyarakat dapat dipandang sebagai suatu upaya untuk membantu negara dan lembaga lembaganya guna melaksanakan tugas dengan cara yang lebih dapat diterima. (Nadia Astriani, 2015)

Adapun strategi pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau di Kelurahan Buntusu, ialah:

a. Penataan Jalur Hijau (*Green belt*)

Green belt atau Green Line yang juga biasa disebut jalur hijau adalah sebagai salah satu bentuk hutan kota memiliki fungsi menjaga kelangsungan hidup bumi, yakni

sebagai media yang memiliki kemampuan mengurangi zat pencemar udara termasuk Karbon dioksida (CO₂) yang melayang di udara dan penghasil Oksigen (O₂) (Iwan, 2009).

Berdasarkan kondisi eksisting di Kelurahan Buntusu, jalur hijau memiliki presentasi cukup sedikit dikarenakan kurang terawatnya tanaman atau pepohonan yang berada di jalur hijau dan sebagian jalur hijau digunakan sebagai lahan parkir. Dengan ini perlu pengawasan yang tegas mengenai penggunaan lahan yang tidak sesuai seperti lahan parkir. Serta melakukan penghijauan dan penanaman pohon di beberapa titik jalur hijau di Kelurahan Buntusu sehingga presentase ruang terbuka hijau dapat bertambah dan berfungsi untuk menjaga kualitas udara.

b. Pemanfaatan Taman atap (*Roof top Garden*)

Dalam perkembangannya konsep taman atap ini menjadi alternatif bagi kota-kota besar di beberapa negara untuk mengatasi keterbatasan ruang terbuka hijaunya. Di beberapa negara taman atap terbukti mampu menambah RTH dan memberi dampak positif terhadap ekosistem perkotaan. Dengan adanya penyediaan *rooftop garden* berdampak pada peningkatan ruang terbuka hijau di

Kelurahan Buntusu. *rooftop garden* dapat mengurangi tingkat polusi udara, menurunkan suhu udara, konservasi air yang menjadikan taman atap dapat menyimpan sebagian air yang berasal dari air hujan.

Di Kelurahan Buntusu terdapat bangunan berpotensi untuk dijadikan *rooftop garden* tersebar di beberapa area permukiman. Tidak semua bangunan dalam satu wilayah permukiman dapat dijadikan ruang terbuka hijau berdasar *rooftop garden*. Berdasarkan dari kedalaman penanaman dan perawatannya, *rooftop garden* dengan jenis *Extensive green roof* sangatlah sesuai untuk direalisasikan di Kelurahan Buntusu karena hanya membutuhkan media tanam (tanah) yang dangkal, dan tanaman yang digunakan adalah tanaman hias ringan serta biaya perawatan yang relatif murah. Taman atap ini mempunyai skala bangunan yang ringan dan sempit sehingga banyak digunakan pada bagian rumah yang tidak terlalu luas seperti garasi, atap rumah, teras, atau dinding.

c. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Taman Lingkungan

Ruang terbuka hijau khususnya di wilayah perkotaan memiliki fungsi yang penting diantaranya terkait aspek ekologi, sosial budaya, dan estetika. Adapun dalam

penyediaannya, haruslah memenuhi kriteria ruang publik yang ideal seperti lokasi yang mudah dijangkau, nyaman, dan memberikan rasa aman bagi penggunanya.

Di Kelurahan Buntusu, terdapat beberapa taman lingkungan dengan kondisi yang tidak terawat, ditumbuhi oleh tumbuhan liar bahkan taman tersebut difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah. Sehingga fungsi taman lingkungan sebagai area interaksi sosial dan area bermain tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi taman lingkungan di Kelurahan Buntusu sebaiknya dilakukan perawatan agar taman lingkungan dapat difungsikan kembali. Serta untuk meningkatkan luas ruang terbuka hijau dengan mengidentifikasi lahan kosong yang ada untuk penyediaan taman sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

d. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat

Melihat fungsi dari ruang terbuka hijau, maka pengelolaannya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hal inilah sangat perlu keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam merencanakan, membangun bersama pengelolaan RTH dan pemerintah kelurahan. Masyarakat pun harus ikut andil dalam meningkatkan luas ruang terbuka hijau di

Kelurahan Buntusu, dengan cara menanam beberapa tumbuhan di sekitar pekarangan rumah. Dan turut serta merawat ruang terbuka hijau yang telah ada di Kelurahan Buntusu. Upaya ini dilakukan untuk memberikan hak masyarakat dan mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang. Masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.

e. Menerapkan *social learning* kepada masyarakat

Adapun *social learning* yang dimaksud ialah membangun perilaku atau pola pikir masyarakat terhadap ruang terbuka hijau seperti, memberi pemahaman tentang kebijakan ruang terbuka hijau, melakukan sosialisasi dalam penerapan atau pengembangan teknologi untuk menciptakan ruang terbuka hijau, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar bersikap ramah lingkungan dan memberikan motivasi untuk mengontrol ruang terbuka hijau di Kelurahan Buntusu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan beberapa tahapan dan proses penelitian terkait Strategi Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Di Kelurahan Buntusu menghasilkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil analisis deskriptif untuk menjawab rumusan masalah pertama, diketahui bahwa faktor yang menjadi penyebab belum terpenuhinya ruang terbuka hijau di Kelurahan Buntusu ialah, penambahan penduduk, lahan kosong yang bersifat privat, kurangnya sosialisasi pemerintah dan kurangnya partisipasi masyarakat.
2. Berdasarkan dari hasil studi literatur untuk menjawab rumusan masalah kedua, dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau di Kelurahan Buntusu masih jauh dari aturan yang mengatur tentang proporsi ruang terbuka hijau di suatu wilayah. Dengan ini strategi pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau di Kelurahan Buntusu dapat dilaksanakan dengan penataan jalur hijau, peningkatan kualitas dan kuantitas taman lingkungan dengan mengidentifikasi lahan kosong yang kiranya dapat

difungsikan menjadi ruang terbuka hijau, pemanfaatan taman atap (*rooftop garden*) bagi bangunan yang sesuai dengan kriteria dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ruang terbuka hijau. Upaya ini dilakukan untuk memberikan hak masyarakat karena masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah
 - a. Perlu melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap penyediaan RTH. Serta menetapkan lahan yang tidak boleh dibangun;
 - b. Merevitalisasi RTH dan penghijauan kembali di beberapa taman yang sudah ada;
 - c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak swasta setempat dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman pentingnya RTH.
2. Bagi masyarakat
 - a. Perlunya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan terutama meningkatkan RTH Privat di setiap pekarangan rumah;

- b. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena beberapa lahan yang belum terbangun berada di bawah kepemilikan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Nugroho, M. Luthfi Eko (2015) *Problematika Penyediaan Ruang Terbuka*

Hijau di Kota Semarang. Jurnal Planologi

Dwiyanto, A. (2009). Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

di permukiman Kota. *Jurnal Nasional Arsitektur*.

Maironi, S. (2019). Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 05/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Di

Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau).

Prianto, A. L. (2017). Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota

Makassar.

Rahmy, W. A., Faisal, B., & Soeriaatmadja, A. R. (2012). Kebutuhan ruang

terbuka hijau kota pada kawasan padat, Studi kasus di Wilayah

Tegallega, Bandung. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 1(1),

27-38.

Astriani, N. (2015). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Bandung. *Veritas et Justitia*, 1(2).

Joga, N. (2013). RTH 30 Persen Resolusi Kota Hijau. Gramedia Pustaka Utama.

Sabdey, A., & Niam, M. F. (2017, August). Kajian Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pada Area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Studi Kasus: Kota Nanga Bulik Kabupaten Lamandau. In Prosiding Seminar Nasional Inovasi Dalam Pengembangan SmartCity (Vol. 1, No. 1).

itorus, S. R., Patria, S. I. D., & Panuju, D. R. (2012). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Timur. Jurnal Lanskap Indonesia, 4(2).

Hamidah, N., Nuswantoro, W., Santoso, M., & Garib, T. W. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Di Kelurahan Bukit Tunggal Kota Palangka Raya. Dinamika Journal: Pengabdian Masyarakat, 2(1).

Usman, A. K., Adisasmitha, I. S. A., MSi, M., & Basir, I. H. A. POTENSI Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perumahan Padat Penduduk di Kota Makassar.

Adji Murtomo, B. (2003). Pendekatan Perkembangan Kota Pada Perancangan Semarang City Hall. *Jurnal Jurusan Arsitektur*, 1, 73-83.

Utomo, P. (2016). Membangun Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Semarang. *Qistie*, 9(2).

Fikri, M. A. (2019). Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25(3).

Dwihatmojo, R. (2016). Ruang terbuka hijau yang semakin terpinggirkan.

Zulkarnaen, E., Harakan, A., & Hawing, H. (2016). Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Implementasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 5(1), 46-59.

Januarisa, D. V., & Hardiansyah, G. (2015). Persepsi Masyarakat Perkotaan Terhadap Pentingnya Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pontianak. *Jurnal Hutan Lestari*, 4(3).

Wicaksono, R. A., & Zuharnen, Z. (2017). Pemanfaatan Citra

Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi dan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Menentukan Lokasi Prioritas Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Surakarta. *Jurnal Bumi Indonesia*, 6(3).



Daftar Riwayat Hidup



Sekar Ayu Delima S lahir di Makassar 29 April 1999, merupakan putri bungsu dari pasangan AKP. Suwondo, SE dan Hj. Sitti Salma. Alamat rumah di Aspol Panaikang Blok D nomor 5, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Dengan riwayat pendidikan yakni pada TK Kemala Bhayangkari, Kota Makassar (2004-2005); SD Kemala Bhayangkari (2005-2011); SMP Negeri 12 Makassar (2011-2013); SMA Negeri 5 Makassar (2013-2016). Melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Bosowa Makassar melalui jalur reguler dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar setelah berhasil menyelesaikan bangku kuliahnya selama 4 tahun.

Selama masa perkuliahan penulis aktif mengikuti kegiatan-kegiatan intra dan ekstra kampus. Penulis aktif dalam kepengurusan Bengkel Seni Teknik Universitas Bosowa sebagai Koordinator Teater periode (2018-2019) dan sebagai Ketua Umum periode (2019-2020). Penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota (HMPWK) Universitas Bosowa Makassar selama dua periode sebagai Anggota Bidang Kaderisasi periode (2017-2020). Serta penulis aktif di kegiatan

kemahasiswaan seperti Ikatan Mahasiswa Perencana Indonesia Timur (IMPI-IT) sebagai Bendahara Umum periode (2017-2018) Penulis juga pernah aktif di kepanitiaan kegiatan-kegiatan Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota (HMPWK). Penulis juga pernah menjadi asisten pada salah satu mata kuliah di program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.



